



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN**

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANAH LAUT

2024



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT***



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN**

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANAH LAUT

2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+149 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.

Kata Pengantar

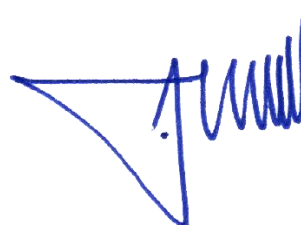
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan LKIP BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Tanah Laut selama periode tahun 2024.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar BPS dapat mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Pimpinan BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Pelaihari, 5 Februari 2025

Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut



Siswo Widjanarko, M.SE., M.Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
1. BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Tanah Laut.....	4
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Tanah Laut	7
1.5. Dukungan Anggaran.....	10
1.6. Potensi dan Permasalahan	11
1.7. Sistematika Penyajian Laporan	13
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut	16
2.2. Rencana Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024.....	27
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	28
2.4. Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut 2024	29
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	33
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut	52
3.3. Capaian Kinerja 2024 terhadap Reviu Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.....	57
3.4. Program/Kegiatan Prioritas Nasional BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	64

3.5.	Analisis Capaian Kinerja PK Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	73
3.6.	Prestasi BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	86
3.7.	Inovasi BPS Kabupaten Tanah Laut	89
3.8.	Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	91
4.	BAB IV PENUTUP	106
4.1.	Tinjauan Umum	106
4.2.	Tindak Lanjut.....	106
4.3.	Saran dan Tindak Lanjut.....	108
	LAMPIRAN	114

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Jabatan Tahun 2024	8
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2024	9
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....	9
Tabel 1. 4 Pagu Anggaran Tahun 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.....	10
Tabel 2. 1 Visi dan Misi BPS 202-2024	17
Tabel 2. 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tujuan BPS Kabupaten Tanah Laut 2020–2024.....	20
Tabel 2. 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kabupaten Tanah Laut 2020–2024	22
Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut yang Tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2020–2024.....	27
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut	28
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Suplemen 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut	29
Tabel 3. 1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang dirinci Menurut Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3. 2 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	35
Tabel 3. 3 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	37
Tabel 3. 4 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Publikasi Statistik Yang Menerapkan Standar Akurasi” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	40
Tabel 3. 5 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	41
Tabel 3. 6 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja “Persentasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	42

Tabel 3. 7 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	44
Tabel 3. 8 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	45
Tabel 3. 9 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Pembinaan Statistik” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	47
Tabel 3. 10 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	48
Tabel 3. 11 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	49
Tabel 3. 12 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	51
Tabel 3. 13 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut periode 2020–2024	53
Tabel 3. 14 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 terhadap Target Renstra 2024 pada Reviu Renstra 2020-2024 ...	57
Tabel 3. 15 Pagu, Realisasi, dan Capaian Rincian Output Kegiatan Prioritas Nasional	66
Tabel 3. 16 Perjanjian Kinerja Suplemen 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut	74
Tabel 3. 17 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama PK Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	75
Tabel 3. 18 Rekapitulasi target dan realisasi survei berbasis rumah tangga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	76
Tabel 3. 19 Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	79
Tabel 3. 20 Tingkat Kematangan dan Kriteria EPSS	82
Tabel 3. 21 Predikat Indeks Hasil EPSS	82
Tabel 3. 22 Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	83

Tabel 3. 23 Histori Revisi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	91
Tabel 3. 24 Nilai Blokir Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	92
Tabel 3. 25 Rincian Anggaran Terakhir BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	93
Tabel 3. 26 Rincian Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Revisi ke-10	96
Tabel 3. 27 Rincian realisasi anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Revisi ke-12.....	96
Tabel 3. 28 Pagu dengan blokir, Realisasi, dan Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra 2020-2024	97
Tabel 3. 29 Pagu tanpa blokir, Realisasi, dan Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 tanpa blokir anggara berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra 2020-2024 ..	98
Tabel 3. 30 Refocusing Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	100
Tabel 3. 31 Perbandingan Automatic Adjustment (AA) Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 - 2024	101
Tabel 3. 32 Perbandingan Penghematan dalam penggunaan Anggaran Belanja Daya dan Jasa BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2024	102
Tabel 3. 33 Perbandingan Efisiensi menurut Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	103

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Gambar 1. 2 SDM BPS Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 2.1 <i>Core Value</i> BPS	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Pusat Statistik 2020-2024	21
Gambar 3. 1 Hasil Survei Kebutuhan Data Persentase Pengguna Data yang menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional	36
Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut terhadap Capaian Kinerja BPS Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan	64
Gambar 3. 3 Piagam Penghargaan WBK Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Tim Penilai Internal	84
Gambar 3. 4 Petis Wenak Kabupaten Tanah Laut	89
Gambar 3. 5 Layanan <i>WhatsApp Bot</i> BPS Kabupaten Tanah Laut	90
Gambar 3. 6 Layanan <i>E-Office</i> BPS Kabupaten Tanah Laut.....	91
Gambar 3. 7 Nilai Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	104
Gambar 3. 8 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	104

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota...	114
Lampiran 2 Reviu Renstra Tahun 2020–2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.....	115
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Tanah 2024.....	116
Lampiran 4 Monitoring Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	120
Lampiran 5 Analisis Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Tanah Laut 2024.....	121
Lampiran 6 Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional	122
Lampiran 7 K/L/D/OPD yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2024	123
Lampiran 8 Daftar Metadata Statistik Sektorl Sesuai Standar Tahun 2024.....	126

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi BPS “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS yaitu:

- (a) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- (b) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- (c) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
- (d) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2020-2024 yang meliputi:

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Pelaksanaan visi dan misi tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dimana PAGU anggaran sebesar Rp6.244.941.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp399.855.000,00 dan capaian realisasi mencapai Rp5.767.238.629,00 atau sebesar 98,67 persen.

Keempat tujuan strategis di atas bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2024 pencapaian target tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas untuk Indonesia Maju, menunjukkan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 101,66 persen. Semua Indikator tujuan strategis BPS Kabupaten Tanah Laut memiliki tingkat capaian kinerja lebih dari 100 persen. Rata-rata capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah

berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan baik.

Tabel 1 Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Anggaran Tanpa Blokir (%)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		100,00	75,97	97,81
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	100,00		
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	100		
T2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN		99,29	98,96	98,99
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	120		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	78,57		
T3 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I		120	92,66	99,31
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	120		
T4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		96,52	98,92	98,93
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	100,61		
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	92,42		
Rata-rata Capaian Kinerja IKU BPS		101,66	92,35	98,67

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 masih ditemui berbagai tantangan dan kendala. BPS Kabupaten Tanah Laut mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga semua target kinerja dapat dicapai. Penggunaan sarana informasi dan teknologi dimanfaatkan dalam membangun komunikasi yang efektif dan efisien baik kantor unit kerja di BPS Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan kegiatan statistik.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Format LKIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, mengamanahkan kepada Badan Pusat Statistik untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder, membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut sebagai instansi pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada pemangku kepentingan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah. BPS Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun ke depan, BPS Kabupaten Tanah Laut telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 yang dituangkan pada

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Tanah Laut periode 2020-2024 adalah menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. BPS Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data, terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, seperti Pendataan Potensi Desa (Podes), Sensus Pertanian (ST) 2023 berupa Survei Ekonomi Pertanian (SEP), dan beberapa survei dan pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2024 di antaranya Survei Perdagangan antar Wilayah, Kompilasi Data Transportasi, Survei Harga Konsumen, Survei Statistik Harga Produsen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Harga Pedesaan, Indeks Kemahalan Konstruksi, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Industri Mikro dan Kecil, Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori, Survei Konstruksi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terintegrasi dengan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Pertanian Tanaman Pangan, dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area. Jadwal penerbitan publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalam *Advance Release Calender (ARC) 2024* yang tersaji pada *website* BPS Kabupaten Tanah Laut.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kabupaten Tanah Laut juga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti implementasi SAKIP yang lebih akuntabel dengan melengkapi dokumen pendukung serta berbasis data terhadap penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja, Monitoring Capaian Kinerja, hingga pembuatan Laporan Kinerja Tahunan.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di

Lingkungan Badan Pusat Statistik, BPS Kabupaten Tanah Laut menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2024 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ini adalah:

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan
4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Tanah Laut

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik serta Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota merupakan landasan konstitusional BPS Kabupaten Tanah Laut yang juga menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 disebutkan bahwa BPS Kabupaten Tanah Laut adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BPS Kabupaten Tanah Laut merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

2. Tugas

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/ Kota.

4. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan sehubungan dengan ada reorganisasi di lingkungan BPS sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Susunan Organisasi BPS Kabupaten/Kota terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Tanah Laut serta membina aparatur BPS Kabupaten Tanah Laut agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja tersebut terdiri dari ketua tim dan anggota tim. Ketua tim merupakan pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim ini yang kemudian akan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh anggota timnya masing-masing.

Adapun Tim Kerja BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, yaitu:

- 1) Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- 2) Statistik Kesejahteraan Rakyat
- 3) Statistik Ketahanan Sosial
- 4) Statistik Pertanian Tanaman Pangan
- 5) Statistik Pertanian Hortikultura dan Perkebunan
- 6) Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
- 7) Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
- 8) ST2023
- 9) Statistik Distribusi
- 10) Statistik Harga
- 11) Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
- 12) Statistik Neraca Produksi
- 13) Statistik Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik
- 14) Diseminasi Statistik dan Statistik Sektoral
- 15) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
- 16) SAKIP
- 17) Humas
- 18) Tim Penilai Badan
- 19) Desa Cantik
- 20) Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa setiap unsur di lingkungan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS Kabupaten Tanah Laut maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

5. Jabatan

- a. Kepala BPS Kabupaten/Kota merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Struktur organisasi BPS Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2023 terdapat pada lampiran 1.

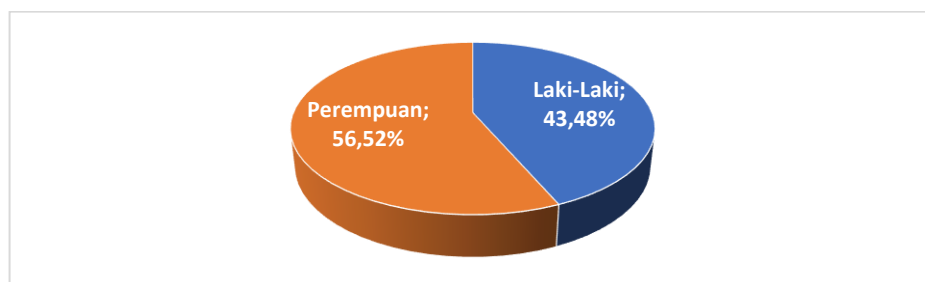
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Tanah Laut

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Tanah Laut, tidak terlepas dari peran penting SDM yang ada. Hingga akhir tahun 2024 total pegawai yang ada di BPS Kabupaten Tanah Laut berjumlah 23 orang. Jumlah pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dikarenakan terdapat 2 pegawai yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) dan 1 pegawai dimutasi/pindah tugas ke BPS Kota Bekasi. Jika meninjau Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja tahun 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik, jumlah pegawai yang ada di BPS Kabupaten Tanah Laut masih belum ideal. Dari 53 kebutuhan pegawai, baru terpenuhi 43,4 persen.

Adapun Komposisi pegawai di BPS kabupaten Tanah Laut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

Jumlah pegawai di BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 lebih banyak yang berjenis kelamin Perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu 13 orang Perempuan dan 10 orang laki-laki

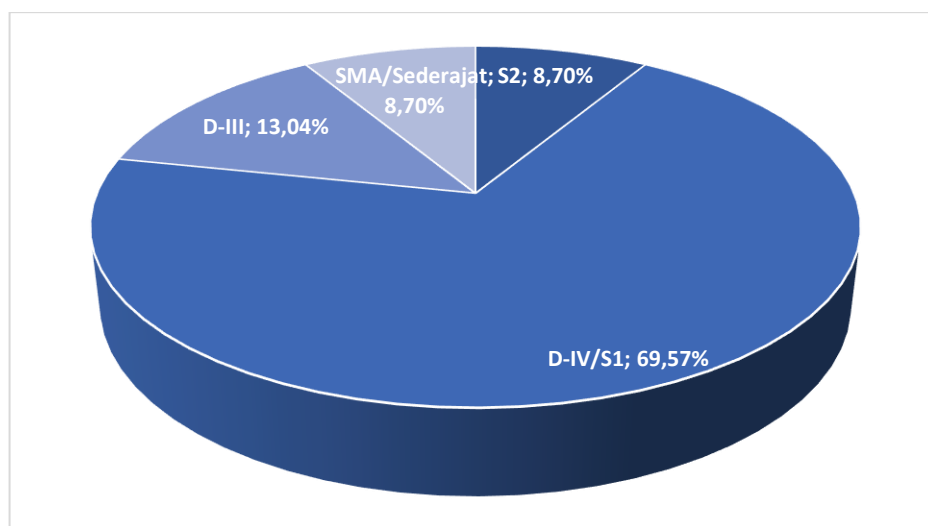


Gambar 1. 1 Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

- b. Komposisi pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas suatu SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM di BPS Kabupaten Tanah Laut didominasi dengan pegawai dengan tingkat Pendidikan D-IV/S1 sebanyak 16 orang (69,57), sementara pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, D-III dan S2 masing-masing sebanyak 2 orang, 3 orang, dan 2 orang. Proporsi SDM yang berpendidikan SMA ke bawah mengalami penurunan dari dibandingkan tahun 2023 yang semula 11,54 persen menjadi 8,7

persen di tahun 2024. Penurunan ini diikuti kenaikan komposisi SDM yang berpendidikan D-IV/S1. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Tanah Laut. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada dibawah ini.



Gambar 1. 2 SDM BPS Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan

c. Komposisi pegawai menurut jabatan

BPS Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 orang pejabat structural dengan komposisi 1 orang Pejabat Eselon III (Kepala) dan 1 orang Pejabat Eselon IV (Kepala Subbagian Umum). Pegawai lainnya merupakan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Jabatan Tahun 2024

Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Pejabat Struktural	1	4,35%
Fungsional Statistisi	18	78,26%
Statistis Ahli Muda	2	8,70%
Statistis Ahli Pertama	9	39,13%
Statistis Penyelia	3	13,04%
Statistis Mahir	1	4,35%
Statistis Terampil	3	13,04%
Fungsional Pranata Komputer	2	8,70%
Pranata Komputer Ahli Muda	1	4,35%
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	4,35%
Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	1	4,35%
Ahli Pertama	1	4,35%
Pelaksana	1	4,35%
Jumlah	23	100,00%

d. Komposisi pegawai menurut golongan

Jika dilihat menurut golongan kepangkatan, Sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 73,91 persen, sedangkan golongan II dan IV sebanyak 17,39 persen dan 8,7 persen.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2024

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
IV	2	8,70
III	17	73,91
II	4	17,39
I	-	-
Jumlah	23	100,00

e. Komposisi pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan kelompok umur, pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh pegawai yang berumur kurang dari 30 tahun, sementara kelompok umur pegawai yang berumur 30 tahun ke atas masing-masing hanya 17,39 persen.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
>50	4	17,39%
41-50	4	17,39%
31-40	4	17,39%
<=30	11	47,83%
Jumlah	23	100,00%

BPS Kabupaten Tanah Laut juga turut mendukung upaya-upaya BPS yang selama ini dilakukan dalam rangka penguatan pengelolaan SDM BPS. Upaya nyata yang dilakukan selama tahun 2024, diantaranya mengikutsertakan pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut dalam Ujian Manajerial Sosial Kultural dan Ujian Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Madya bagi pegawai, serta mengusulkan izin belajar untuk pegawai yang lulusan SMA untuk melanjutkan studi ke jenjang Sarjana.

1.5. Dukungan Anggaran

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Suplemen Tahun 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Anggaran yang disediakan selama tahun 2024 melalui DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-054.01.2.428590/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 beserta realisasinya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 4 Pagu Anggaran Tahun 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

Uraian		Pagu Awal	Pagu dengan Blokir	Pagu tanpa Blokir	Realisasi TA 2024
		Rp	Rp	Rp	Rp
JUMLAH SELURUHNYA		6.291.943.000	6.244.941.000	5.845.086.000	5.767.238.629
GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.932.222.000	1.822.481.000	1.423.260.000	1.392.659.187
GG.2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	2.700.000	600.000	100.000	0
GG.2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	43.565.000	39.752.000	38.646.000	38.304.762
GG.2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	45.728.000	37.449.000	25.974.000	25.680.105
GG.2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	12.454.000	12.812.000	12.435.000	12.432.099
GG.2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	2.701.000	2.490.000	2.469.000	2.459.000
GG.2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	41.352.000	38.936.000	17.407.000	16.479.894
GG.2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	223.658.000	220.989.000	167.562.000	154.047.309
GG.2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	39.321.000	49.239.000	29.794.000	28.607.000
GG.2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	176.547.000	167.691.000	158.006.000	157.682.050
GG.2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	383.577.000	368.416.000	364.532.000	362.921.988
GG.2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	117.063.000	107.455.000	102.572.000	100.322.000
GG.2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	31.345.000	35.794.000	33.076.000	30.899.401
GG.2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.354.000	4.474.000	2.790.000	2.790.000
GG.2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	807.857.000	736.384.000	467.897.000	460.033.579
WA	Program Dukungan Manajemen	4.359.721.000	4.422.460.000	4.421.826.000	4.374.579.442
WA.2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	4.359.721.000	4.422.460.000	4.421.826.000	4.374.579.442

Seluruh kegiatan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Tanah Laut dengan PAGU awal TA2024 sebesar Rp 6.291.943.000,00. Seiring berjalannya waktu, BPS Kabupaten Tanah Laut mengalami 12 kali revisi DIPA selama tahun 2024. Revisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian anggaran baik untuk kegiatan pada

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) maupun Program Dukungan Manajemen (Dukman). Besaran pagu pada akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.244.941.000,00 termasuk blokir anggaran sebesar Rp399.855.000,00. Capaian realisasi mencapai Rp 5.767.238.629,00 atau sebesar 92,3 persen atau sebesar 98,67% dari pagu yang dapat digunakan.

1.6. Potensi dan Permasalahan

BPS Kabupaten Tanah Laut memiliki kualitas SDM yang cukup baik. Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Tanah Laut terletak pada infrastruktur teknologi informasi. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

Dalam menunjang kegiatan administrasi, BPS Kabupaten Tanah Laut juga telah memiliki sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Beberapa inovasi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan administrasi yang telah diterapkan yaitu, *Backoffice Selindo (BOS)*, penggunaan *Google Sheet* untuk evaluasi capaian kinerja bulanan, penomoran surat, matriks POK, matriks SPD, dan matriks honor. Selain itu, digunakan juga aplikasi *Presensi Online* untuk melakukan presensi, *webapps* KiPAPP untuk pembuatan SKP, serta Aplikasi Daftar Hadir yang berupa sistem informasi yang mengatur tentang presensi kehadiran pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut saat pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Kabupaten Tanah Laut telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi pada tahun pertama dalam periode Renstra 2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Tanah Laut harus mendapatkan respon yang tepat agar citra BPS Kabupaten Tanah Laut dari sudut pandang responden sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju dapat terus meningkat.

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Pada tahun 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan normalisasi proses bisnis kegiatan, dari sebelumnya pada tahun 2020 - 2021 kegiatan lebih banyak dilakukan secara online akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 kegiatan BPS Kabupaten Kabupaten Tanah Laut sudah kembali normal yaitu dengan melaksanakan pelatihan tatap muka dan pengumpulan data secara langsung menemui responden. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Tanah Laut dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kabupaten Tanah Laut menyajikan data individu sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Secara teknis, kebijakan satu data juga memberikan tantangan baru bagi BPS, termasuk BPS Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan *Ad Hoc* yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut di tengah terbatasnya penambahan jumlah SDM.

Dari sisi pengolahan, kebijakan pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* menyebabkan sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Permasalahan lain yang dihadapi BPS Kabupaten Tanah Laut adalah belum adanya alokasi perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kabupaten Tanah Laut saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Kabupaten Tanah Laut masih belum memiliki dan masih dalam tahap pengembangan sistem perencanaan karir dan sistem mutasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

1.7. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Tanah Laut; sumber daya manusia dan dukungan anggaran di BPS Kabupaten Tanah Laut; potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Tanah Laut; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi Misi, Sasaran Strategis, Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Tanah Laut 2020-2024, Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kerja Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut 2024, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024, Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut terhadap Target Renstra 2020-2024, Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2024, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Tanah Laut 2024, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Tanah Laut 2024, dan Realisasi Anggaran tahun 2024 serta memuat Kebijakan berbasis Lokal BPS Kabupaten Tanah Laut.

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka menengah BPS yang sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

BPS Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS Kabupaten Tanah Laut melakukan koordinasi dan kerja sama untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Rencana Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020–2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional yang berlaku selama kurun waktu 2020-2024. Dokumen ini berdasarkan atas Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan pada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

BPS Kabupaten Tanah Laut wajib berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik pada wilayah Kabupaten Tanah Laut. Visi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut dengan mengacu pada visi Badan Pusat Statistik untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah:

“Penyedia Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi tersebut memiliki arti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia melainkan juga di tingkat dunia. Visi tersebut juga semakin memperkuat peran BPS sebagai pembina data statistik.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional maupun internasional.
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tabel 2. 1 Visi dan Misi BPS 202-2024

VISI BPS 2020- 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional maupun internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah

1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional maupun internasional.

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*"

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan.

BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep,

definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dalam rangka mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.



Gambar 2. 1 Core Value BPS

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Nilai-nilai organisasi tersebut kemudian dilebur ke dalam core value ASN BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021. Insan BPS diharapkan dapat mencermati dan mengamalkan perilaku BerAKHLAK dalam melaksanakan amanah pekerjaannya serta mencerminkan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa. dengan ditetapkannya berAKHLAK sebagai Core Values untuk seluruh ASN, maka Core Values BPS sebelumnya yaitu Profesional, Integritas dan Amanah (PIA) diganti menjadi berAKHLAK. Core Values berAKHLAK dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan panduan perilaku (kode etik): memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku (kode etik): melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku kode etik): meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku (kode etik): menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya; suka menolong orang lain; dan membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dengan panduan perilaku (kode etik): memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan, serta menghadapi perubahan; Dengan panduan perilaku (kode etik): cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan bertindak proaktif;

g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Dengan panduan perilaku (kode etik): memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Tujuan dalam rencana strategis BPS adalah suatu keadaan yang dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi. Tujuan yang ditetapkan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Empat Tujuan BPS Tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah (Nilai profesionalisme, integritas, dan amanah sebagaimana pada misi ke-4 kemudian diubah dengan berlandaskan nilai Core Value ASN BerAKHLAK)

Masing-masing tujuan memiliki sasaran tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tujuan BPS Kabupaten Tanah Laut 2020–2024

Visi: Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju		
Misi	Tujuan	Sasaran
Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional	T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik berkualitas
Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan	T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Visi: Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah	T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1 SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Tanah Laut yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung administrasi BPS (pelayanan internal).

Dalam pelaksanaan sasaran strategis, BPS Kabupaten Tanah Laut memiliki peta strategis yang dijabarkan dari 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Pusat Statistik 2020-2024

Adapun tujuan indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Tanah Laut dan mewujudkan Misi BPS Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kabupaten Tanah Laut 2020–2024

Tujuan	Indikator Kinerja Utama
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) perspektif yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat

- iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - ix. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - x. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - xi. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
 - i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas, dengan indikator:
 - i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
2. Perspektif *Costumers*
- SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.
- Dengan indikator sasaran:
- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
 - b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Dengan indikator sasaran: Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Tanah Laut

Sebagai Satuan Kerja Instansi Vertikal, arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020–2024 harus selaras dan mengadopsi arah kebijakan dan strategi BPS RI dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN dan pencapaian visi dan misi BPS yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;

Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Arah Kebijakan: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Strategi:

- a. Meningkatkan akurasi data melalui penjaminan kualitas di setiap tahap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral.
- b. Memastikan kemutakhiran data.

- c. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS Kabupaten Tanah Laut dalam publisitas data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut.
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut.

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;

Sasaran: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Arah Kebijakan : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Strategi:

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c. Memaksimalkan peran BPS Kabupaten Tanah Laut sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar yang menunjukkan keberhasilan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam pembinaan statistik sektoral.

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;

Sasaran: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Arah Kebijakan: Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN

Strategi:

- a. Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)

Arah Kebijakan: Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional

Strategi:

- a. Penguatan Koordinasi dengan OPD dengan memaksimalkan peran BPS Kabupaten Tanah Laut sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Arah Kebijakan: Penyediaan statistik sektoral

- a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke OPD di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Koordinasi dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik sektoral.

Keberhasilan tujuan dan sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik yang menunjukkan keberhasilan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam pembinaan statistik sektoral.

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi;

Sasaran: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Arah Kebijakan:

- a. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja

Strategi:

- 1) Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran. Khususnya di lingkup BPS Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Melakukan pembinaan atau sosialisasi terkait SAKIP untuk internal pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut

- b. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja

Strategi:

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.

- c. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

Strategi:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran;
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- d. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima

Strategi:

- 1) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
- 2) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

- e. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

Strategi:

- 1) Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;

- 2) Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;
- 3) Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.

Keberhasilan BPS Kabupaten Tanah Laut diukur dengan indikator:

- a. Hasil penilaian implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Tanah Laut

2.2. Rencana Strategis BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2020–2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020–2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020–2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut yang Tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2020–2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan (%)	67*	70*	90	93	96	Kelompok Fungsional
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	n.a*	n.a*	100	100	100	Kelompok Fungsional
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	n.a*	n.a*	100	100	100	Kelompok Fungsional
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	n.a*	n.a*	60	65	70	Kelompok Fungsional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)						
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	n.a*	n.a*	100	100	100	Kelompok Fungsional
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65	66	67	67,5	68	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	90	90	93	93	95	Subbagian Umum

Catatan: * Perubahan IKU berdasarkan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun atau pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun terdiri atas penetapan target indikator yang akan dicapai selama rentang waktu 1 tahun. Selama periode 2024 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	70
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	73,25
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

2.4. Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut 2024

Perjanjian kinerja suplemen pada dasarnya adalah target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun atau pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja suplemen yang ditetapkan pada awal tahun terdiri atas penetapan target indikator yang akan dicapai selama rentang waktu 1 tahun.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Suplemen 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	85
	Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota	Persen	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100
	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah	Poin	1,8
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)	Persen	100
	Nilai Kinerja Anggaran minimal "Baik".	Poin	81

Keberhasilan pencapaian target kinerja di BPS Kabupaten Tanah Laut didukung oleh penganggaran yang diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- Kegiatan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan satuan kerja seperti penyediaan alokasi gaji pegawai, dan operasional dan pemeliharaan perkantoran (Layanan Perkantoran)
- Kegiatan Perencanaan dan penganggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan Kerumahtanggaan dan Barang Milik Negara (BMN).
- Kegiatan Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana BPS antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. (Layanan Sarana dan Prasarana Internal)
- Kegiatan administrasi pegawai dan jabatan fungsional.
- Kegiatan organisasi dan tata Kelola internal.
- Kegiatan kehumasan dan protokoler.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
- Kegiatan pengelolaan manajemen keuangan dan kinerja internal BPS.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan

analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat
- k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial
- l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi, dan Pariwisata;
- m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik sehingga lebih beragam, rinci dan akurat yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam perencanaan baik oleh pemerintah, dunia usaha, peneliti maupun masyarakat luas.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2024, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan kinerja suatu instansi dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis capaian kinerja instansi sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi agar suatu instansi menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja BPS tahun 2024 merupakan rata-rata pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama periode tahun anggaran 2024. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang selaras dengan dokumen Reviu Rencana Strategis periode 2020-2024.

3.1.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dijabarkan ke dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Dengan indikator tujuan : Meningkatnya pemanfaatan data statistik berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu:

- Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan.
- Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi.

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.

Dengan indikator tujuan : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional, yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu :

- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
 - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.
- Dengan indikator tujuan : Penguatan Statistik Sektoral sektoral K/L/D/I, yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu :
- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.
- Dengan indikator tujuan: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu:
- Hasil penilaian implementasi SAKIP.
 - Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Rincian capaian kinerja tujuan yang dirinci menurut IKU BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang dirinci Menurut Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	100	100,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	100	100,00
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100	125	120,00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	70	55	78,57
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100	125	120,00
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	73,25	73,70	100,61
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100	92,42	92,42

3.1.2. Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”. Tujuan pertama ini menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka penyediaan data statistik yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dan mempunyai 2 (dua) indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama tersebut disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	Persen	100	100	100,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1					100,00

Berdasarkan Tabel 3.2, tujuan strategis pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :

IKU 1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Pengukuran indikator sasaran strategis ini didapat melalui hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2024. Indikator ini menguraikan mengenai perbandingan jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan terhadap jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan	
$P\ PMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$	
P PMEP	: Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
JPMEP	: Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan
JP	: Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS

Lampiran 9 Persentase Konsumen K/L/OPD yang Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan menurut Wilayah PST (persen)

Satker PST	Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan
(1)	(2)
Kabupaten Tanah Laut	100,00

Gambar 3. 1 Hasil Survei Kebutuhan Data Persentase Pengguna Data yang menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional

Target pada indikator “persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan” tahun 2024 sebesar 100 persen. Penetapan target tersebut mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil SKD 2024 yang terdapat pada gambar 3.1, realisasi indikator sasaran strategis pertama pada tujuan pertama ini sebesar 100 persen sehingga capaian kinerja indikator kinerja pertama adalah sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik realisasi maupun capaian kinerja indikator pertama untuk tujuan pertama yaitu persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dapat tercapai dengan baik. Artinya, Seluruh OPD menggunakan data BPS sebagai dasar, perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Keberhasilan tercapaian indikator kinerja ini juga ditunjang dengan Indikator pendukung antara lain 1) Jumlah publikasi statistik yang terbit tepat waktu; 2) Jumlah rilis data statistik yang dilaksanakan tepat waktu; 3) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. “Jumlah publikasi statistik yang terbit tepat waktu” tahun 2024 sebanyak 27 publikasi. Perincian publikasi statistik yang terbit tepat waktu dan rilis data statistik yang tepat waktu dapat dilihat pada lampiran. “Jumlah rilis data statistik yang tepat waktu” pada tahun 2024 mencapai 11 rilis. Kemudian untuk indikator pendukung “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS” terealisasi sebesar 13.348 pengunjung unik.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Permasalah/kendala yang dimaksud tidak hanya permasalahan terkait pencapaian realisasi, namun juga terkait dengan proses dalam menghasilkan data yang nantinya akan digunakan oleh pengguna data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Secara Umum		
1.	Beberapa responden menginginkan data hingga level desa dan rilis beberapa data tidak sesuai dengan timeline dari OPD untuk penilaian kinerja maupun pengambilan kebijakan. Contoh: data tingkat pengangguran yang dirilis sudah melewati waktu pelaporan OPD saat memberikan laporan untuk kinerja dan Hasil IPS belum terbit saat Pemda melaporkan untuk penilaian RB.	1. Melakukan pelayanan dengan prima kepada pengguna data 2. Melakukan diskusi dan menjelaskan alternatif data yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan OPD yang bersangkutan. 3. Melakukan pemutakhiran secara berkala terhadap website BPS dengan data terbaru agar dapat menyajikan data yang dibutuhkan oleh pengguna data.
Penyusunan Publikasi Statistik		
2.	Proses penyusunan publikasi Statistik dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup singkat dengan jadwal rilis yang disepakati karena menunggu pengiriman dari BPS RI serta masih terdapat revisi data.	Membentuk tim penyusun publikasi dengan alokasi tugas masing-masing untuk mempercepat proses penyusunan publikasi dan melakukan revisi data sesuai dengan instruksi yang diberikan.

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Rilis Data Statistik		
3.	1. Bahan/data untuk penyusunan bahan rilis diberikan pada waktu yang berdekatan dengan tanggal rilis. 2. Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut tidak dapat secara langsung melaksanakan rilis karena sedang sakit.	1. Melakukan penyusunan bahan rilis berupa BRS dengan segera. Serta menyiapkan template bahan rilis sesuai ketentuan dan menyusun bahan rilis sesegera mungkin dan jika terkena pada hari libur maka dilaksanakan lembur agar dapat selesai dan rilis tepat waktu. 2. Melakukan rilis BRS diwakilkan oleh Statistisi Ahli Madya dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengelola Website BPS		
4.	Terdapat perubahan tampilan website BPS sehingga pengguna data masih belum familiar untuk penggunaan fitur yang tersedia.	Memperkenalkan tampilan website BPS kepada pegawai saat rapat, kepada stakeholder saat rilis angka inflasi, kepada pengunjung PST, dan sebagainya. Serta memperbaharui website secara berkala

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

1. Melakukan komunikasi kepada OPD secara berkala untuk menyampaikan informasi terkini mengenai data yang dihasilkan oleh BPS.
2. Penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi persiapan penyusunan publikasi pada tahun depan serta dapat melakukan identifikasi lebih dini terkait kendala yang kemungkinan dapat terjadi.
3. Melakukan penyusunan laporan kegiatan statistik harga sebagai bahan evaluasi dalam menyiapkan bahan rilis data statistik Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.
4. Melakukan migrasi dan melengkapi data secara berkala pada website baru dengan data terbaru. Selain itu, akan dilakukan promosi website baru diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna data.

IKU 1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi

Indikator ini melihat jumlah publikasi statistik yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan standar akurasi. Dalam penghitungan indikator ini, publikasi yang menerapkan standar akurasi adalah publikasi yang mencantumkan nilai *Relative Standard Error* (RSE). Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan	
$P\ PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$	
P PbAS :	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi.
JPbAS :	Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.
JPb :	Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi ditargetkan terbit.

Berdasarkan acuan data dari Subdit PDSS diidentifikasi bahwa target publikasi yang menerapkan standar akurasi dengan tingkat sampai level kabupaten terdapat 3 publikasi yaitu, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Profil Tenaga Kerja. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Tanah Laut menetapkan target indikator kedua sasaran strategis pertama dari tujuan pertama ini pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 persen. Pada tahun 2024 telah terdapat 3 publikasi yang menerapkan standar akurasi telah dirilis pada website <https://tanahlautkab.bps.go.id>. Terdapat perubahan terhadap rencana awal yaitu Publikasi Profil Tenaga Kerja yang direncanakan dirilis pada Desember 2024 sesuai arahan dari BPS RI diubah menjadi Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut Agustus 2023 yang telah dirilis pada bulan Juni 2024. Rilis publikasi lebih awal dibandingkan target yang direncanakan karena ketersediaan data yang sudah dikirimkan oleh BPS RI. Publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang telah dirilis tepat waktu pada tahun 2024, antara lain:

1. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut 2024
2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut 2024
3. Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut Agustus 2023

Realisasi indikator kedua untuk sasaran strategis pertama pada tujuan pertama ini sebesar 100 persen. BPS Kabupaten Tanah Laut dapat menerbitkan publikasi yang menerapkan standar akurasi secara tepat waktu sebanyak 3 (tiga) publikasi Dengan demikian, indikator sasaran strategis pertama tercapai sebesar 100 persen.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Publikasi Statistik Yang Menerapkan Standar Akurasi” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Secara Umum		
1.	Proses penyusunan publikasi sangat bergantung pada ketersediaan template dan data oleh BPS Pusat sehingga waktu penyusunan dan jadwal rilis cukup pendek.	Melakukan komunikasi intensif terhadap Penanggungjawab Kegiatan (PJK) mengenai ketersediaan data dan melakukan persiapan dengan penyusunan draft publikasi yang siap diisi dengan data dan analisis.
2.	Beberapa data masih mempunyai <i>relative stadard error</i> (RSE) yang besar.	Menampilkan data dengan RSE yang besar dengan diberikan penjelasan yang memadai.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

1. Melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang lebih baik.
2. Pengawasan pada proses survei pada tahun berikutnya dengan lebih teliti sehingga diharapkan dapat menurunkan *relative stadard error* (RSE).

3.1.3. Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”. Tujuan ini memuat misi BPS Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan peran sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN dan juga sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS Kabupaten Tanah Laut sebagai pembina data di wilayah Kabupaten Tanah Laut sesuai Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN” dan mempunyai 2 (dua) indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis untuk tujuan kedua tersebut disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional	2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100	125	120,00
	2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	70	55	78,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2					99,29

Berdasarkan Tabel 3.5, capaian kinerja tujuan kedua didapat dari indikator sasaran strategis sebagai berikut:

IKU 2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Indikator ini menguraikan persentase tindak lanjut rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan oleh K/L/D/I. Dengan tercapainya indikator ini menunjukkan keberhasilan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina Statistik sesuai Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Setiap K/L/D/I yang akan melaksanakan kegiatan statistik wajib mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap pembina data, yaitu Badan Pusat Statistik setempat. Setiap pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dilaporkan di sistem yang terpusat dinamakan Romantik Online. Pengajuan rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh BPS setempat hingga K/L/D/I mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan juga mendapatkan status kelayakan dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Hasil rekomendasi kegiatan statistik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L/D/I. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah Tim Teknis (Tim Diseminasi Statistik dan Statistik Sektoral) yang beranggotakan pegawai pada kelompok fungsional tertentu. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan	
$P \text{ LmRS} = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$	
P LmRS :	Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
JLmRS :	Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
JLR :	Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan

Pada indikator ini, BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 menetapkan target sebesar 100 persen. Penetapan ini diperoleh dari 4 OPD yang ditargetkan mendapatkan rekomendasi dari target 4 OPD yang mendapatkan pembinaan tahun 2024. Namun pada realisasinya, sebanyak 5 OPD (125 persen) telah mengajukan rekomendasi serta berhasil mendapatkan surat dan nomor rekomendasi dengan status rekomendasi berupa “Layak” oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Adapun 5 OPD tersebut antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 120 persen (melebihi target yang ditentukan). Daftar OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik, informasi nomor rekomendasi serta kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja “Persentasen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

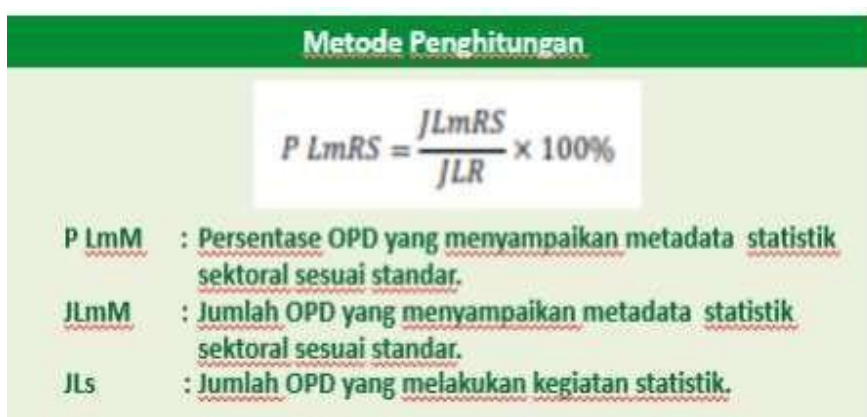
No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1.	Alur pengajuan romantik masih belum didampingi secara optimal oleh walidata	BPS menghubungi walidata untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi sebelum pemberian rekomendasi layak dari BPS.
2.	OPD masih belum memahami alur dan konteks pengisian formulir dari kegiatan statistik sektoral pada website romantik	Melakukan pendampingan pengisian formulir pada website romantik
3.	Beberapa OPD baru mengajukan romantik setelah kegiatan statistik sektoral selesai pada triwulan sebelumnya.	Meminta OPD mengajukan romantik kegiatan statistik sektoral pada triwulan selanjutnya

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan walidata untuk dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi pada website romantik terhadap kegiatan statistik sektoral yang diajukan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Melakukan internalisasi kepada OPD yang menjadi target pembinaan statistik sektoral agar memahami proses pengisian romantik.

IKU 2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

BPS sebagai pembina maupun koordinator statistik nasional melakukan penghimpunan metadata kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus. Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus dilakukan BPS dalam rangka penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Penghimpunan metadata ini dilakukan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan kegiatan pendataan metadata statistik sektoral dan khusus yang ada di Kabupaten Tanah Laut secara rutin setiap tahun. Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Tanah Laut mengambil peran melaksanakan koordinasi penyampaian metadata sektoral pada OPD yang ada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Penanggung jawab indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah Kelompok fungsional. Formula pengukuran indikator ini adalah:



The image shows a green header with the text "Metode Penghitungan". Below it, a white box contains the formula
$$P \text{ LmRS} = \frac{J \text{ LmRS}}{J \text{ LR}} \times 100\%$$
. Below the formula, three definitions are listed:
P LmM : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.
JLmM : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.
JLs : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-310/03000/ES/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 perihal Ukuran Keberhasilan Impelementasi Metadata Statistik, ditetapkan bahwa target jumlah K/L/D/I atau OPD yang menyampaikan metada statistik sektoral dan khusus sebesar 70% dari jumlah populasi OPD yang berkontribusi dalam penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA) BPS Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan ketentuan di atas, BPS Kabupaten Tanah Laut menetapkan target sebesar 70 persen untuk indikator kinerja sasaran strategis ini. BPS Kabupaten Tanah Laut mengidentifikasi ada sebanyak 20 OPD yang melakukan kegiatan statistik sehingga jumlah OPD yang perlu menyampaikan metadata sebanyak 14 OPD. Realisasi indikator ini tahun 2024 sebesar 55 persen dari target yang ditetapkan sebesar 70 persen. Terdapat 11 OPD yang menyampaikan metadata dari 20 OPD yang melakukan kegiatan statistik. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar” sebesar 78,57 persen.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah

Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Walidata belum mengetahui OPD yang melakukan kegiatan statistik sektoral yang berkontribusi dalam DDA untuk diminta melaporkan metadata statistik sektoralnya.	Memberikan informasi OPD yang berkontribusi dalam DDA melalui Penyerahan Publikasi Tanah Laut Dalam Angka 2024 dan Daftar OPD yang berkontribusi. Untuk dilakukan pelaporan metadata statistik sektoralnya.
2	Pengisian website indah terkait variabel dan indikator yang digunakan dalam kegiatan statistik sektoral oleh OPD belum sesuai kaidah Standar Data Statistik (SDS)	Memberikan <i>feedback</i> terhadap variabel dan indikator statistik setoral yang telah dilaporkan pada website indah agar sesuai SDS. Serta melibatkan Walidata dalam sosialisasi Kepka BPS tentang Standar Data Statistik Nasional.
3	Walidata menyampaikan metadata statistik sektoral diakhir tahun sehingga waktu pemeriksaan isian metadata menjadi terbatas.	Melakukan pemeriksaan metadata secepatnya agar tidak melewati batas penyampaian metadata statistik sektoral

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan walidata agar mengetahui OPD yang berkontribusi terhadap DDA melalui penerbitan surat pengantar dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupate Tanah Laut yang menyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh OPD sudah benar dan dapat disajikan kedalam DDA.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan walidata agar dapat menetapkan Standar Data Statistik untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Tanah Laut.
- 3) Bersama walidata menyusun jadwal rencana pengumpulan dan penyampaian metadata statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD.

3.1.4. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu

pembakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis, yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”.

Tabel 3. 8 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS3.1 Penguatan Statistik Sektoral sektoral K/L/D/I	3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100	125	120,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3					120,00

Fokus utama pada tujuan ketiga ini adalah peran serta BPS memberikan pelayanan prima dalam bentuk pembinaan kepada K/L/D/I terkait di wilayah kerjanya agar mampu menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Sesuai dengan sasaran strategisnya ditetapkan 1 indikator sasaran strategis, yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik”. Capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga tersebut disajikan pada Tabel 3.8.

Berdasarkan Tabel 3.8, tujuan strategis ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” mempunyai satu sasaran strategis yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

IKU 3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

Kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan statistik sektoral yang sesuai NSPK bertujuan untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien; meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah seluruh tim teknis BPS Kabupaten Tanah Laut. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan	
$P \text{ LmSS} = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$	
P LmSS	: Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).
JLmSS	: Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik
JLs	: Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik

Pada indikator ini, BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 menetapkan target sebesar 100 persen atau 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik dari 4 (empat) OPD yang menjadi target pembinaan statistik. OPD yang menjadi target pembinaan, antara lain:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut,
2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Realisasi pada tahun 2024 dari indikator sasaran strategis dari tujuan ketiga sebanyak 5 (lima) OPD yang telah mendapatkan pembinaan statistik. OPD yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2024 adalah:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut,
2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan tabel 3.8, target indikator pertama sasaran strategis pertama dari tujuan ketiga telah tercapai 125 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan ketiga sebesar 120 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” telah tercapai.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Pembinaan Statistik” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Pembinaan Statistik Sektoral		
1.	SDM pada BPS Kabupaten Tanah Laut masih kurang memiliki kapabilitas dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektoral	Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan bidang statistik di Pusdiklat BPS dalam rangka peningkatan kapabilitas SDM.
2.	OPD kurang memahami tentang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral, pengajuan Rekomendasi Statistik serta penyusunan metadata statistik sektoral	Membagi tugas kepada pegawai untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada OPD yang menjadi target pembinaan agar lebih memahami pelaksanaan statistik sektoral
EPSS		
3.	Kurangnya peran dari Diskominfo dan Bappeda dalam mendukung kegiatan EPSS, sehingga produsen data yang dinilai merasa jika EPSS adalah kegiatan BPS yang butuh bantuan mereka.	Mengaktifkan dan memanfaatkan forum SDI untuk mengembangkan kegiatan Statistik Sektoral. Serta diharapkan Pemda memiliki pandangan yang sama, dimana Diskominfo dan Bappeda memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan Statistik Sektoral.
4.	Produsen data yang dinilai belum merasakan esensi dari kegiatan EPSS	Membuat timeline dan pertemuan rutin dalam forum SDI untuk seluruh produsen data, sehingga kegiatan EPSS tersosialisasikan secara merata
5.	Produsen data yang dinilai kurang responsif dan antusias sehingga kurang maksimal dan lambat	Kegiatan selanjutnya mengacu pada surat edaran yang telah dibuat dan mensosialisasikan ke seluruh produsen data
6.	Kegiatan yang dilaksanakan belum mengikuti tahapan surat edaran yang telah dibuat dan belum terdapat SOP untuk setiap tahapan kegiatan Terkendala waktu antara Produsen data dan BPS	Membuat SOP yang lebih lengkap dan rinci untuk setiap tahapan kegiatan
7.	Di awal tim BPS masih meraba dengan tujuan dan seperti apa pelaksanaan EPSS karena baru mengikuti kegiatan Statistik Sektoral, sehingga butuh waktu untuk memahami alur kegiatan EPSS	Melakukan pendampingan ke produsen data yang akan dinilai sejak awal kegiatan yang akan dinilai
8.	Kurangnya pendampingan selama kegiatan yang dinilai berlangsung, sehingga bukti dukung sulit dikumpulkan	Lebih fokus dan meluangkan waktu untuk kegiatan EPSS
9.	Tim BPS fokus setelah kegiatan sudah selesai terlaksana	Berkoordinasi dengan Diskominfo dan Bappeda serta Produsen Data yang akan dinilai terkait pelaksanaan EPSS
10.	Tim BPS kurang fokus ke pelaksanaan EPSS karena bersamaan kegiatan BPS yang lain	Menyusun timeline kegiatan bersama produsen data yang akan dinilai

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
11.	Terkendala waktu dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral	Mem-follow up ke Produsen Data terkait kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

1. Menugaskan kepada pegawai untuk mengikuti setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM terutama dalam pembinaan statistik sektoral.
2. Melakukan internalisasi kepada seluruh anggota tim Pembinaan Statistik Sektoral BPS Kabupaten Tanah Laut secara berkala.
3. Menyusun rencana pembinaan yang terstruktur dan terealisasi dengan penyusunan Lembar Kerja (LK) Pembinaan Statistik Sektoral. Diharapkan setiap proses pembinaan dapat dilakukan sesuai tahapan yang baik dan terdokumentasi dengan lengkap.

3.1.5. Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis, yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan keempat ini mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Untuk mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat tersebut disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	73,25	73,70	100,61
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100	92,42	92,24
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4					96,52

Berdasarkan Tabel 3.10, tujuan strategis keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” mempunyai satu sasaran strategis yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

IKU. 4.1.1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada instansi diharapkan dapat mewujudkan hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Penanggung jawab di BPS Kabupaten Tanah Laut untuk indikator ini adalah Subbagian Umum dimana nilai SAKIP didapatkan dari Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pelaksanaan evaluasi SAKIP rutin dilakukan setiap tahun.

Pada tahun 2024, indikator sasaran strategis “Hasil penilaian implementasi SAKIP” BPS Kabupaten Tanah Laut ditargetkan 73,25 poin, target tersebut ditetapkan mengacu pada hasil penilaian implementasi SAKIP tahun 2023. Berdasarkan Surat Inspektur Wilayah I BPS RI Nomor B-98/08100/PW.100/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 73,7 dengan perdikat BB. Dengan demikian, realisasi indikator sasaran strategis pertama pada tujuan keempat sebesar 73,7 poin, dengan capaian kinerja indikator sasaran strategis sebesar 100,61.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Secara Umum		

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1.	Kesulitan dalam pengungkapan kendala, solusi, dan tindak lanjut serta bukti dukung yang sesuai dari masing-masing tim.	Melakukan diskusi dengan seluruh tim terkait kendala, solusi, tindak lanjut dan bukti dukung yang sesuai
2.	Analisis pada notulensi capaian kinerja setiap triwulan masih belum berkesinambungan dengan baik.	Melakukan diskusi mengenai analisis capaian kinerja pada notulensi untuk dilengkapi oleh masing-masing tim kerja.
3.	Dokumen pendukung masih belum terorganisir dengan rapi.	Pengarsipan secara terstruktur dokumentasi pelaksanaan capaian kinerja sehingga saat diperlukan sebagai dokumen sumber dapat diakses dengan mudah.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

- 1) Melakukan pelaporan dokumen capaian kinerja hingga triwulan IV 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
- 2) Melakukan monitoring evaluasi kinerja pegawai melalui SKP sebagai bahan dukung capaian kinerja organisasi.
- 3) Menyusun template analisis capaian kinerja setiap triwulan agar mendapatkan analisis capaian kinerja yang berkesinambungan.

IKU 4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Indikator ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan konsumen terhadap sarana dan prasarana terkait pelayanan data oleh BPS Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus serta aplikasi pelayanan online bagi responden online. Pengukuran indikator ini diperoleh dari Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penanggung jawab dari indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah Sub Bagian Umum dan Tim Diseminasi Statistik. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Formula IKS 4.1.2:

$$\%KPSP = \frac{\sum P_{puas}}{\sum PBPS} \times 100\%$$

Keterangan:

%KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

$\sum P_{puas}$: Jumlah pengunjung PST BPS yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS

$\sum PBPS$: Jumlah pengunjung PST BPS

Penetapan target pada tahun 2024 mempertimbangkan target Renstra 2024 sebesar 95 persen, dan realisasi tahun 2023 sebesar 100 persen, serta rentang target PK Kepala Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang tertuang pada Sekretaris Utama Nomor B-53/02000/PR.110/2024 sebesar 96-98 persen, sehingga pada indikator kinerja ini ditetapkan target 2024 sebesar 100 persen.

Berdasarkan Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarann BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 mencapai 92,42 persen. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS sebesar 92,42 persen. Capaian kinerja pada indikator ini masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil rekomendasi SKD 2024 didapatkan bahwa beberapa fasilitas yang menjadi prioritas utama dalam perbaikan layanan adalah Kemudahan Persyaratan Pelayanan dan Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama. Perbaikan juga perlu dilakukan pada atribut-atribut dengan prioritas perbaikan rendah yaitu: 1) Kemudahan Prosedur; 2) Kesesuaian Biaya Pelayanan; dan 3) Kesesuaian Produk Pelayanan.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini juga ditunjang oleh indikator pendukung lainnya, yaitu “Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik” dan “Jumlah pengunjung langsung Pelayanan Statistik Terpadu (PST)”. Kondisi pada bulan Desember 2024, Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik sebesar 78,25 persen dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen. Kemudian untuk Indikator pendukung Jumlah pengunjung langsung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) terealisasi sebanyak 24 orang. Jumlah pengunjung yang datang secara langsung ke PST BPS Kabupaten Tanah Laut tergolong sedikit karena pengguna lebih banyak menggunakan sarana berbasis daring.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penjelasan permasalahan/kendala beserta solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS” BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Secara Umum		
1.	Sarana kelengkapan PST seperti kursi, meja, dan layar monitor kurang memadai sehingga pengunjung merasa kurang nyaman.	Meminjam kursi dan meja dari ruangan lain saat jumlah pegunjung PST yang datang secara bersamaan cukup banyak. Serta

No	Permasalahan/Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
		melakukan pengadaan meja dan kursi melalui belanja barang pada triwulan IV 2024.
2.	Petugas pelayanan kepada pengguna data yang datang secara langsung terbatas karena sedang melaksanakan kegiatan lain.	Menerapkan jam pelayanan PST serta melakukan pelayanan prima kepada pengguna data yang datang secara langsung maupun melalui media daring.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pencapaian target pada indikator ini, antara lain:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan sarana yang masih kurang untuk dilakukan persiapan pengadaan tahun anggaran selanjutnya.
- 2) Melakukan penataan pada Ruang PST dengan memenuhi standar minimal sarana.
- 3) Menetapkan tim pelayanan publik dan menerapkan jam pelayanan PST serta prosedur pelayanan kepada pengguna data.

Berdasarkan Tabel 3.10, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan keempat pada tahun 2024 mencapai 96,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” dengan sasaran strategis “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” hampir tercapai.

Dengan total nilai capaian kinerja seluruh tujuan sebesar 101,66 persen menunjukkan bahwa secara keseluruhan tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai pada Tahun 2024.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut

3.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tahun 2020-2024

Pada tahun 2022, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020–2024. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa perubahan pada metadata indikator kinerja utama BPS Kabupaten sehingga hanya ada beberapa indikator yang tidak mengalami perubahan metadata yang dapat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 dan 2021. Sedangkan indikator kinerja utama tahun 2022 - 2024 sudah selaras dan dapat dibandingkan kondisi antar tahunnya. Adapun indikator yang mengalami perubahan metadata antara lain:

- 1) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi;

- 2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik;
- 3) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar;
- 4) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6. dibawah ini, IKU berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 3 Tahun 2022.

Tabel 3. 13 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut periode 2020–2024

Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				110			100			100			102,08			100
1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas				110			100			100			102,08			100
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	67	100	120	100	100	100	100	100	100	96	100	104,17	100	100	100
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
T2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				100			100			100			110			99,29
2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN				100			100			100			110			99,29
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	50	100	120	100	125	120
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	-	-	-	-	-	-	70	70	100	70	70	100	70	55	78,57
T3 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				100			100			100			100			120
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I				100			100			100			100			120
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	125	120
T4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				104,86			100,82			101,68			106,08			96,52
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan				104,86			100,82			101,68			106,08			96,52
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	60	65,6	109,33	65,6	66,7	101,68	67,4	69,59	103,25	70	73,25	104,64	73,25	73,7	100,61
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100	99,98	99,98	96,7	96,67	99,97	96,67	96,77	100,1	93	100	107,53	100	92,42	92,42
Nilai Capaian Kinerja				104,19			100,24			100,48			105,19			101,66

Berdasarkan Tabel 3.13, rata-rata capaian kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut selalu diatas 100 persen setiap tahunnya. Jika dilihat perkembangan tiap tahun, capaian

kinerja secara total mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara berturut-turut, yaitu 100,24 persen, 100,48 persen, dan 105,19 persen. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 101,66 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi 2020 (sebelum pandemi covid-19) capaian kinerja tahun tersebut (104,19) relatif lebih tinggi daripada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi BPS Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja per Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s.d. 2024

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tanah Laut periode 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Secara rata-rata, realisasi capaian per tujuan dan sasaran strategis per tahun sudah diatas 100 persen. Pada tahun 2024, terdapat 2 (Dua) tujuan dan sasaran strategis yang mengalami peningkatan capaian kinerja pada jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu pada Tujuan/Sasaran 3 dan Tujuan/Sasaran 4. Perbandingan capaian perjanjian kinerja pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perbandingan capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis pertama.

Pada Pada tahun 2024, capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis pertama adalah sebesar 100 persen. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (102,08 persen) namun target pada 2024 tetap tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian pada awal Renstra, capaian tahun 2020 lebih tinggi daripada capaian tahun 2021, 2022, dan 2023. Capaian pada Tujuan/Sasaran ini dihasilkan dari dua indikator yaitu, Indikator 1 “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan” dan Indikator 2 “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi”. Realisasi Indikator pertama di Tujuan/Sasaran ini dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat mempertahankan realisasi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024, BPS Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan capaian kinerja pada pelayanan ke pengguna data dimana data statistik yang dihasilkan oleh BPS dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna data yang berasal dari OPD sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan.

Perbedaan yang signifikan pada target indikator kedua, indikator sebelumnya adalah “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”. Berdasarkan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 berubah menjadi “persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi”, terdapat perbedaan cara menghitung indikator kedua sehingga nilai indikator

pada tahun 2022 s.d. 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada target indikator ini memiliki capaian kinerja yang sama sepanjang 2022 s.d. 2024 yaitu sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan BPS Kabupaten Tanah Laut mampu menghasilkan publikasi yang menerapkan standar akurasi sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis kedua

Berdasarkan Tabel 3.6, capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis kedua mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d. 2023, kecuali pada tahun 2024. Capaian dari tahun ke tahun selalu diatas 100 persen kecuali pada tahun 2024. Ada dua indikator penyusun tujuan/sasaran strategis ini yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata. Kedua indikator tersebut mengalami perubahan metadata sehingga hanya bisa dibandingkan dari tahun 2022. Pada tahun 2023, target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sebesar 50 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2024, target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 125 persen. Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sesuai standar juga dapat mencapai realisasi 100 persen, kecuali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral.

c. Perbandingan capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis ketiga

Terdapat perbedaan Indikator pada tujuan dan sasaran strategis ketiga berdasarkan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022. Indikator kinerja sebelumnya adalah “Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral sesuai NSPK” berubah menjadi “Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan statistik”. Terdapat perbedaan cara menghitung indikator kedua sehingga nilai indikator pada tahun 2022 s.d. 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2024, capaian pada tujuan dan sasaran strategis ketiga mengalami peningkatan menjadi 120 persen. Pada tahun 2024, BPS Kabupaten Tanah Laut meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan Statistik Sektoral sehingga capaian di tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Indikator pendukung tujuan/sasaran strategis ketiga adalah persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

d. Perbandingan capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis keempat

Pada tahun 2024, capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis keempat adalah sebesar 96,52 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 106,08 persen. Ada dua indikator pada

Tujuan/Sasaran ini yaitu, Hasil Penilaian Implementasi SAKIP dan Persentase Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Capaian kinerja tahun 2024 masing-masing indikator sasaran juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023. Namun pada indikator hasil penilaian implementasi SAKIP tetap diatas 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian indikator hasil penilaian implementasi SAKIP lebih tinggi tetapi Persentase Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS mengalami penurunan.

Pada tahun 2024, hasil penilaian SAKIP BPS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin jika dibandingkan dengan nilai SAKIP pada tahun 2023. Dari target sebesar 73,25 poin, BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 73,7 poin. Capaian kinerja dan hasil penilaian implementasi SAKIP yang lebih tinggi tersebut menandakan bahwa BPS Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP dengan memperhatikan target yang ditetapkan dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Capaian indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 7,58 persen dibandingkan capaian kinerja indikator pada tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini sebesar 92,42 persen dari target sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 92,42 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna data mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan nilai realisasi IKS tersebut tidak terlepas dari ekspektasi pengguna data yang tinggi dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini memberikan catatan bahwa BPS Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020-2024

Perbandingan rata-rata capaian kinerja tujuan dan rata rata capaian kinerja sasaran tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6. menunjukkan perkembangan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ratarata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode tersebut selalu di atas 100 persen, hal ini menunjukkan upaya dan komitmen BPS Kabupaten Tanah Laut untuk dapat merealisasikan target kinerja dan meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya berdasarkan target kinerja yang telah disusun dan direncanakan.

3.3. Capaian Kinerja 2024 terhadap Reviu Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

3.3.1. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut Terhadap Target Reviu Renstra Tahun 2020-2024

Capaian kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut selama periode renstra 2020-2024 memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perkembangan realisasi kinerja per Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target renstra pada tahun berjalan secara umum telah dapat dicapai.

Tabel 3. 14 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 terhadap Target Renstra 2024 pada Reviu Renstra 2020-2024

Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Reviu Renstra 2020-2024	Tahun 2020			Capaian terhadap Target Renstra 2020	Reviu Renstra 2020-2024	Tahun 2021			Capaian terhadap Target Renstra 2021	Reviu Renstra 2020-2024	Tahun 2022			Capaian terhadap Target Renstra 2022	Reviu Renstra 2020-2024	Tahun 2023			Capaian terhadap Target Renstra 2023	Reviu Renstra 2020-2024	Tahun 2024			Capaian terhadap Target Renstra 2024
		Target 2020	Target PK	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Target 2021	Target PK	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Target 2022	Target PK	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Target 2023	Target PK	Realisasi i Kinerja	Capaian Kinerja		Target 2024	Target PK	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					120,00				100,00					100,00					102,08					100,00		
1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas					120,00				100,00					100,00					102,08					100,00		
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	67	67	100	120,00	149,25	70	100	100	100,00	142,86	90	100	100	100,00	111,11	93	96	100	104,17	107,53	96	100	100	100,00	104,17
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					100,00				100,00					110,00					110,00					99,29		
2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN					100,00				100,00					110,00					110,00					99,29		
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	120	100,00	100	50	100	120	100,00	100	100	125	120	125,00
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	100,00	100,00	70	70	70	100,00	100,00	70	70	55	78,57	78,57
T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					100,00				100,00					120					120					120		
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					100,00				100,00					120					120					120		
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	120	100,00	100	100	100	120	100,00	100	100	125	120	125,00
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					104,66				100,82					101,68					106,08					96,52		
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					104,66				100,82					101,68					106,08					96,52		
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65	60	65,6	109,33	100,92	66	65,6	66,7	101,68	101,06	67	67,4	69,59	103,25	103,87	68	70	73,25	104,64	107,72	68	73,25	73,7	100,61	108,38
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	95	100	99,98	99,98	105,24	95	96,7	96,67	99,97	101,76	95	96,67	96,77	100,10	101,86	95	93	100	107,53	105,26	95	100	92,42	92,42	97,28
Rata-rata Capaian Kinerja IKU BPS					109,77				100,55					106,19					108,05					101,66		

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi kinerja tujuan strategis pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Reviu Renstra 2020-2024 belum semua target dapat terealisasi. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 5 (lima) indikator telah mencapai target akhir Renstra 2020-2024. Capaian kinerja untuk tujuan kedua indikator sasaran kedua belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024 dengan capaian masih berada di bawah 100 persen atau baru 78,57 persen. Capaian kinerja untuk tujuan keempat indikator sasaran kedua belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024 dengan capaian masih berada di bawah 100 persen atau baru 97,28 persen. Perbandingan dan penjelasan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pertama dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

a. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.”

Untuk indikator kinerja sasaran pertama dengan realisasi capaian di tahun 2024 sebesar 100 persen, sedangkan target akhir renstra adalah sebesar 96 persen. Sehingga capaian terhadap target akhir renstra adalah 104,17 persen.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

1. Beberapa responden menginginkan data hingga level desa dan Rilis beberapa data tidak sesuai dengan timeline dari OPD untuk penilaian kinerja maupun pengambilan kebijakan. Contoh: data tingkat pengangguran yang dirilis sudah melewati waktu pelaporan OPD saat memberikan laporan untuk kinerja dan Hasil IPS belum terbit saat Pemda melaporkan untuk penilaian RB.
2. Proses penyusunan publikasi Statistik dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup singkat dengan jadwal rilis yang disepakati karena menunggu pengiriman dari BPS RI serta masih terdapat revisi data.
3. Pengiriman data final oleh BPS RI mendekati tanggal rilis sehingga waktu penyiapan bahan rilis data statistik cukup terbatas.
4. Terdapat perubahan tampilan website BPS sehingga pengguna data masih belum familiar.

Solusi:

1. Melakukan diskusi dan menjelaskan alternatif data yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan OPD yang bersangkutan.
2. Membentuk tim penyusun publikasi dengan alokasi tugas masing-masing untuk mempercepat proses penyusunan publikasi dan melakukan revisi data sesuai dengan instruksi yang diberikan.
3. Melakukan penyusunan bahan rilis dengan lembur pada hari libur agar dapat siap rilis data statistik tepat waktu.
4. Memperkenalkan tampilan website BPS kepada pegawai saat rapat, kepada stakeholder saat rilis angka inflasi, kepada pengunjung PST, dan sebagainya. Serta memperbaharui website secara berkala

Rencana Aksi Tindaklanjut:

1. Melakukan komunikasi kepada OPD secara berkala untuk menyampaikan informasi terkini mengenai data yang dihasilkan oleh BPS.

2. Penyusunan Laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi persiapan penyusunan publikasi pada tahun depan.
3. Melakukan penyusunan laporan kegiatan statistik harga sebagai bahan evaluasi dalam persiapan bahan rilis data statistik Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.
4. Melakukan pemeriksaan dan pemutakhiran secara rutin kesesuaian isi pada website baru.

b. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi”

Indikator kinerja sasaran kedua pada tujuan pertama yaitu “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi” dengan capaian terhadap target akhir renstra sebesar 100 persen. Realisasi kinerja IKS pada tahun 2024 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2020-2024 sebesar 100 persen. Jumlah target publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang pada tahun 2024 adalah 3 publikasi.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

1. Proses penyusunan publikasi sangat bergantung pada ketersediaan template dan data oleh BPS Pusat sehingga waktu penyusunan dan jadwal rilis cukup pendek.
2. Beberapa data masih mempunyai relative stadard erro (RSE) yang besar.

Solusi:

1. Melakukan komunikasi intensif terhadap Penanggungjawab Kegiatan mengenai ketersediaan data dan melakukan persiapan dengan penyusunan draft publikasi yang siap diisi dengan data dan analisis.
2. Menampilkan data dengan RSE yang besar dengan diberikan penjelasan yang memadai.

Rencana Aksi Tindaklanjut:

1. Melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang lebih baik.
2. Pengawasan pada proses survei pada tahun berikutnya dengan lebih teliti sehingga diharapkan dapat menurunkan RSE.

2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kedua dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

Capaian Kinerja tujuan dan sasaran strategis kedua dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut berada di 99,29 persen. Untuk

indikator kinerja sasaran pertama dengan capaian kinerja sebesar 125 persen dan indikator kinerja sasaran kedua sebesar 78,57 persen.

a. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik”

Untuk indikator kinerja sasaran ini, populasi pembagi pada IKS ini adalah jumlah OPD yang menjadi target pembinaan. BPS Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk menambah jumlah OPD yang mengajukan rekomendasi statistik ke BPS Kabupaten Tanah Laut dalam rangka kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD di wilayah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

- Beberapa OPD belum mengajukan rekomendasi saat akan melakukan kegiatan statistik dan informasi belum secara penuh disosialisasikan oleh walidata

Solusi:

- Selama tahun 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut telah menjalin koordinasi dengan walidata agar OPD di lingkungan Kabupaten Tanah Laut mengetahui dan memahami rekomendasi kegiatan statistik.

Rencana Aksi Tindaklanjuti:

- Melakukan sosialisasi Rekomendasi kepada OPD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 agar lebih dikenal dan dipahami.

b. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar”.

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran dibandingkan target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 78,57 persen. Pada tahun 2024 ada sebanyak 11 dari 20 OPD yang sudah menyampaikan metadata statistik sektoral.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

- Pada tahun 2024 koordinator penyampaian metadata statistik sektoral adalah walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Tanah Laut tidak dapat meminta secara langsung kepada OPD untuk menyampaikan metadata dan pada sisi lain OPD masih memahami penyampaian metadata.

Solusi:

- BPS Kabupaten Tanah Laut melakukan pembinaan dan komunikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut khususnya operator mengenai progress dan kendala yang dihadapi saat melakukan penyampaian

metadata agar seluruh OPD yang memahami dan menyampaikan metadata sektoral.

Rencana Aksi Tindaklanjut:

- Penyusunan Laporan kegiatan metadata statistik sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 serta melaksanakan sosialisasi metadata sektoral kepada OPD yang melaksanakan kegiatan statistik.

3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Ketiga dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

Capaian Kinerja tujuan dan sasaran strategis ketiga dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 125 persen.

a. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan statistik”

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja sasaran dibandingkan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 125 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut menargetkan 4 OPD untuk dilakukan pembinaan dan realisasi sebanyak 5 OPD yang telah dilakukan pembinaan.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM pada dinas terkait yang dapat mengikuti pembinaan statistik juga menjadi satu kendala terhambatnya pembinaan statistik. Kendala internal adalah SDM BPS yang memahami materi pembinaan masih terbatas dan perlunya menyusun materi dengan bahasa yang dapat dimengerti orang awam statistik.
2. OPD kurang memahami tentang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral, pengajuan Rekomendasi Statistik serta penyusunan metadata statistik sektoral.

Solusi:

1. Memperkuat SDM BPS dengan melakukan internalisasi materi pembinaan statistik.
2. Membagi tugas kepada pegawai untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada OPD yang menjadi target pembinaan agar lebih memahami pelaksanaan statistik sektoral.

Rencana Aksi Tindaklanjut:

1. Menugaskan kepada pegawai untuk mengikuti setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM.

2. Menyusun rencana pembinaan yang terstruktur dan terealisasi serta penyusunan laporan pembinaan statistik sektoral sebagai bahan untuk pelaksanaan di tahun depan.

4. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Keempat dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

Capaian Kinerja tujuan dan sasaran strategis keempat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut telah adalah Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pertama sebesar 108,38 persen dan capaian kinerja indikator kinerja sasaran kedua sebesar 97,28 persen.

a. Indikator Kinerja Sasaran “Penilaian Hasil Implementasi SAKIP”

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja sasaran dibandingkan target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 108,38 persen. Nilai Implementasi SAKIP BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebesar 73,7. Meningkat sebesar 0,45 poin dibandingkan dengan Nilai SAKIP Tahun 2023, yaitu 73,25. Hal ini menunjukkan perbaikan nilai implementasi SAKIP sebagaimana komitmen BPS Kabupaten Tanah Laut untuk semakin meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan BPS Kabupaten Tanah Laut. Target akhir Renstra 2020-2024 menetapkan perolehan nilai sebesar 68 poin, atau dengan kata lain target renstra tersebut telah tercapai. Namun, BPS Kabupaten Tanah Laut tetap berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP BPS Kabupaten Tanah Laut dengan selalu melakukan perbaikan baik dalam hal kelengkapan dokumen dan pelaksanaan Implementasi SAKIP di Kantor BPS Kabupaten Tanah Laut.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

1. Kesulitan dalam pengungkapan kendala, solusi, dan tindaklanjut serta bukti dukung yang sesuai dari masing-masing tim sebagai dokumen pendukung implementasi SAKIP.
2. Dokumen pendukung implementasi SAKIP masih belum terorganisir dengan rapi sehingga masih kesulitan dalam penuhan permintaan dokumen atas impementasi SAKIP.

Solusi:

1. Melakukan diskusi dengan seluruh tim terkait kendala, solusi, tindaklanjut dan bukti dukung dokumen implementasi SAKIP yang sesuai.
2. Pengarsipan secara terstruktur dokumentasi pelaksanaan capaian kinerja sehingga saat diperlukan sebagai dokumen sumber implementasi SAKIP dapat diakses dengan mudah.

Rencana Aksi Tindaklanjuti:

1. Melakukan dokumentasi dan pelaporan dokumen SAKIP dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan melakukan monitoring evaluasi kinerja pegawai secara berkala melalui SKP.

b. Indikator Kinerja Sasaran “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS”

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja sasaran kedua dibandingkan target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 97,28 persen. Hal ini menunjukkan target akhir yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 95 persen masih belum dapat dicapai oleh BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024. Adanya penurunan nilai hasil SKD tahun 2024 terkait kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan data karena keterbatasan sarana prasarana di BPS Kabupaten Tanah Laut. Tidak ada ruang tunggu dan ruang layanan kurang luas serta masih kekurangan meja dan kursi untuk pelayanan kepada masyarakat. Namun, BPS Kabupaten berkomitmen peningkatan sarana dan prasarana dengan pengadaan meja dan kursi untuk pelayanan.

Analisis Kondisi/Permasalahan:

1. Sarana kelengkapan PST seperti kursi, meja, dan layar monitor kurang memadai sehingga pengunjung merasa kurang nyaman.
2. Jumlah pengunjung online lebih banyak daripada pengunjung yang datang secara langsung dan petugas pelayanan terbatas karena melaksanakan kegiatan lain.

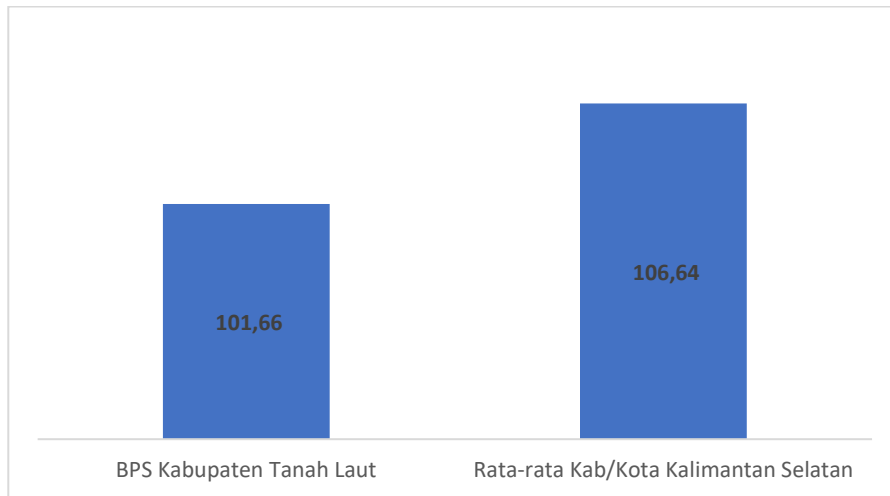
Solusi:

1. Meminjam kursi dan meja dari ruangan lain saat jumlah pengunjung PST yang datang secara bersamaan cukup banyak. Serta melakukan pengadaan meja dan kursi melalui belanja barang pada triwulan IV 2024.
2. Melakukan pelayanan prima baik secara online maupun offline serta menerapkan jam pelayanan PST.

Rencana Aksi Tindaklanjuti:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana yang masih kurang untuk dilakukan persiapan pengadaan tahun anggaran selanjutnya.
2. Menetapkan tim pelayanan publik dan menerapkan jam pelayanan PST.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut terhadap Capaian Kinerja BPS Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan

Berdasarkan gambar di atas, BPS Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja BPS Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil tersebut, BPS Kabupaten Tanah Laut telah mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat diterapkan, yaitu pendampingan lebih intensif kepada walidata terhadap pelaporan metadata statistik sektoral dan peningkatan sarana dan prasarana di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Tanah Laut.

3.4. Program/Kegiatan Prioritas Nasional BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

3.4.1. Dukungan Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dijalankan dan bersesuaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran pada tahun berkenaan. Setiap program/kegiatan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan program kegiatan yang nersesuaian dengan tujuan/sasaran strategis BPS Kabupaten Tanah Laut.

- A. Pada Tujuan 1 Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar dengan Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas, didukung oleh Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, antara lain:
- Kegiatan Pengembangan dan Analisis Statistik (2896.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898.BMA dan 2898.QMA)

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899.BMA)
 - Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902.BMA dan 2902.QMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalan Energi dan Konstruksi (2904.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907.BMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata (2908.BMA dan 2908.QMA)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan (2909)
 - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (2910.BMA dan 2910.QMA)
- B. Pada Tujuan 2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran 2 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN didukung oleh Program PPIS dengan kegiatan
- Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897.BMA)
- C. Pada Tujuan 3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran 3 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I, didukung program PPIS dengan kegiatan:
- Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897.BDB)
- D. Pada tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan Sasaran 4 SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, didukung program Dukungan manajemen dengan kegiatan sebagai berikut:
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (2886.EBA, 2886.EBB, dan 2886.EBD)

3.4.2. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2024, pada Kementerian/Lembaga Badan Pusat Statistik terdapat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional III - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

4 Prioritas Nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 4 (empat) kegiatan prioritas, 6 (enam) rincian output yang ada di Satuan Kerja BPS Kabupaten Tanah Laut dengan pagu mencapai Rp611.217.000,00 dengan blokir sebesar Rp 148.743.000,00 dan realisasi sebesar Rp.457.825.579,00 (74,90%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Pagu, Realisasi, dan Capaian Rincian Output Kegiatan Prioritas Nasional

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	KRO	RO Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	Realisasi CRO (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	008 Publikasi/ Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB (Layanan)	1.350.000	950.000	70,37	Layanan	1	1	100
2	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026 (Layanan)	9.698.000	7.471.000	77,04	Layanan	1	1	100
3	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (Layanan)	274.666.000	129.052.279	46,99	Layanan	1	1	100
4	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	007 Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan (Layanan)	75.305.000	74.258.300	98,61	Layanan	1	1	100
5	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	010 Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area (Layanan)	242.119.000	240.041.000	99,14	Layanan	1	1	100
6	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	009 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE (layanan)	8.079.000	6.053.000	74,92	Layanan	1	1	100
JUMLAH					611.217.000	457.825.579	74,90				

Dalam menunjang pelaksanaan program prioritas tersebut, Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan sensus dan/atau survei, dengan penjelasan sebagai berikut:

Prioritas Nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Penyusunan Disagregasi PMTB

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Prioritas Nasional Ke-1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dirinci menurut jenis aset tetap, lapangan usaha, dan sektor institusi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan penyusunan disagregasi PMTB.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan disagregasi PMTB juga didasari oleh:

1. Rekomendasi Data Gaps Initiative (DGI)
G20 DGI merekomendasikan penyusunan PMTB (investasi fisik) menurut jenis aset tetap dan sector institusi (pelaku ekonomi), termasuk akumulasi investasi fisik.
2. Target Sustainable Development Goals (SDGs)
SDGs mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada Goal ke-8. PMTB memiliki peranan penting sebagai kunci pemulihan perekonomian.
3. Kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Disagregasi PMTB menurut jenis aset tetap, lapangan usaha, dan sektor institusi, digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan investasi serta seberapa jauh pemerintah perlu melakukan intervensi agar tidak terjadi crowding out.
4. Kebutuhan statistik neraca nasional
Kebutuhan basis data investasi dalam neraca nasional untuk penyusunan stok kapital dan konsumsi aset tetap.

Kegiatan penyusunan disagregasi PMTB dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan pada 2022; kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan rekonsiliasi pada 2023; dan kegiatan analisis dan rekonsiliasi lanjutan, diseminasi, dan penyusunan stok kapital pada 2024. Pada tahap pengumpulan data, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2023. Survei ini bertujuan untuk menghasilkan indikator yang akan digunakan dalam mendisagregasi PMTB menurut jenis aset tetap, lapangan usaha, dan sector Institusi. Hasil survei ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital. Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2022 diharapkan akan menghasilkan data rinci penambahan dan

pengurangan barang modal menurut jenis aset tetap sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro. Pada tahun 2023, sebagai bentuk penjaminan mutu dan kualitas data neraca yang dihasilkan maka dilakukan rekonsiliasi awal data Disagregasi PMTB. Pagu anggaran untuk rincian output ini sebesar Rp1.350.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp400.000,00, dan realisasi sebesar Rp950.000,00 (70,37 persen).

Sensus Ekonomi 2026

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Sensus Ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Adapun SE ke-lima yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 disebut sebagai Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah suatu negara. Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha.

Perkembangan perekonomian yang pesat membutuhkan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, sehingga perubahan ekonomi yang dinamis dapat dimonitor. BPS mendukung penyediaan data perekonomian tersebut melalui pembangunan *Statistical Business Register* (SBR). SBR merupakan daftar unit ekonomi yang terstruktur dan termutakhir secara reguler dalam suatu wilayah, yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR mempunyai peran penting dalam memproduksi statistik ekonomi. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka sampel untuk survei – survei ekonomi dan dapat digunakan untuk menyusun demografi bisnis. SBR mengintegrasikan data yang bersumber dari data administrasi, sensus, survei, profiling, dan lain-lain. Setiap ada data yang masuk ke dalam sistem SBR akan dilakukan matching untuk menghindari duplikasi. Data unmatched dianggap sebagai data baru yang akan menambah jumlah data SBR sebelumnya.

Dalam rangka persiapan dan mendukung suksesnya Sensus Ekonomi tahun 2026, data SBR akan digunakan sebagai identifikasi awal keberadaan usaha/perusahaan yang harus dicek keberadaannya. Berangkat dari hal ini dapat disimpulkan bahwa data SBR harus terus menerus diperbaiki, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pemeliharaan dan Pemutakhiran data SBR memerlukan dukungan dan kerjasama yang

baik dari Subject Matter (SM) di pusat dan di daerah. Pemeliharaan dan pemutakhiran data SBR harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pemeliharaan dan pemutakhiran data SBR akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan juga oleh Subject Matter di daerah yang dekat dengan sumber datanya. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dilakukan kembali pemutakhiran data SBR melalui kegiatan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi.

BPS Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan SBR pada tahun 2024 dengan pagu anggaran untuk RO Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026 (2902.QMA) sebesar Rp9.698.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp2.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.471.000,00 (77,04 persen).

Statistik E-Commerce

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan E-Commerce. Fenomena E-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. Kemudahan dan pesatnya perkembangan transaksi E-Commerce mempunyai potensi yang tinggi dalam perekonomian, sehingga pemerintah menjadikan pendataan E-Commerce sebagai salah satu program Prioritas Nasional Tahun 2023. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Survei E-Commerce 2023 sebagai tindak lanjut dari Program Prioritas Nasional Kesatu yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Dalam rangka pemetaan E-Commerce di Indonesia, BPS melakukan pendataan e-commerce berbasis perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha E-Commerce di Indonesia, dari sudut pandang pelaku usaha/pengguna jasa E-Commerce. Pendataan E-Commerce 2023 diarahkan pada metode Go Digital. Dengan berbasis CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Dengan metode ini diharapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, mengingat ketersediaan data dapat dilakukan lebih murah, cepat dan akurasi data dapat lebih terjaga. Cakupan atau Ruang Lingkup Survei E-Commerce tahun 2023 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup 159 kabupaten/kota. Usaha/perusahaan yang dicakup dalam survei ini adalah usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan terdapat transaksi penjualan melalui internet di tahun 2022. Cakupan Survei ECommerce 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan

sebanyak 106 blok sensus dan 782 usaha. Pada blok sensus dilakukan pendaftaran rumah tangga atau usaha (listing). Setelah tahapan kegiatan listing selesai, tahap selanjutnya melakukan wawancara pada usaha yang menjadi sampel terpilih.

Survei ini dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Pagu Anggaran untuk kegiatan survei ecommerce tahun 2023 di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp8.079.000,-. dengan blokir anggaran sebesar Rp1.021.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.053.000,00 (74,92%).

Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dilakukan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program *Food and Agricultural Organization* (FAO) yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture* (WCA). Untuk memperoleh keterbandingan internasional, Sensus Pertanian dilaksanakan sedekat mungkin dengan tahun 2020.

Kegiatan ST2023 telah dimulai sejak tahun 2021 dan direncanakan seluruh kegiatan akan berakhir pada tahun 2024. Pada tahun 2023 akan dilakukan kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), publisitas, penetapan kerangka geospasial dan muatan wilkerstat, pelatihan petugas, pencacahan lengkap, pengolahan, monitoring kualitas, post enumeration survey, survei ekonomi pertanian, pengolahan survei ekonomi pertanian, analisis hasil, uji coba survei produksi dan lingkungan pertanian, penyusunan diseminasi, dan probity audit. Sementara itu, kegiatan ST2023 selama tahun 2024 terdiri dari kegiatan pengadaan TIK, penyusunan hasil informasi geospasial hasil ST2023, survei produksi dan lingkungan pertanian, pengolahan survei produksi dan lingkungan pertanian, diseminasi, dan probity audit.

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi "*World Programme for the Census of Agriculture 2020*", maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
2. Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
3. Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa output dari hasil ST2023 yaitu:

1. Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan di antara dua sensus;
2. Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
3. Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
4. Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
5. Pemanfaatan cost effective data collection tools and methodology yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI);
6. Pemanfaatan data administrasi (Direktori yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga dimutakhirkan pada pelaksanaan ST2023).

Pagu Anggaran Sensus Pertanian di BPS Kabupaten Tanah Laut TA 2024 sebesar Rp274.666.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp129.571.000,00 dan realisasi sebesar Rp129.052.279 (46,99 persen).

Statistik Tanaman Pangan

Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan. Tujuan pelaksanaan survei ubinan tanaman pangan adalah memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) dan memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, sistem penanaman jarak legowo (khusus padi), penggunaan pupuk, penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan lain-lain.

Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) mencakup seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan dengan alokasi sampel awal sebanyak 4.434 plot yang terbagi ke dalam 3 (tiga) subround, dimana pada kegiatan survei ubinan komoditas padi berbasis pada Survei Kerangka Sampel Area (KSA). Survei ubinan dilaksanakan rutin setiap tahun dalam tiga periode, yaitu subround/SR I (periode Januari-April), SR II (periode Mei-Agustus), dan SR III (periode September-Desember). Pemutakhiran rumah tangga suatu subround dilakukan pada bulan terakhir subround sebelumnya.

Pengolahan hasil pencacahan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dilakukan di masing-masing BPS Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan pengolahan dokumen SP menggunakan aplikasi SIMTP offline, dokumen pencacahan listing ubinan (Sub P) dengan aplikasi Sub P offline dan dokumen pencacahan sampel ubinan Sub S dengan menggunakan program aplikasi SIMTP Online. Pagu anggaran untuk kegiatan Survei Tanaman Pangan/Ubinan adalah sebesar Rp75.305.000,00 dengan realisasi sebesar Rp74.258.300,00 (98,61 persen).

Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah suatu metode yang dikembangkan oleh BPPT bekerjasama dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (eye estimate). Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dilakukan pada 2 (dua) komoditas, yaitu komoditas padi dan komoditas jagung. Pendataan dengan metode KSA pada komoditas padi dilaksanakan sejak Bulan Januari 2018 dan metode KSA pada komoditas jagung dilaksanakan sejak Bulan April 2019. Sejak tahun 2021, kegiatan pendataan Statistik Pertanian Tanaman pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA 2021) diharapkan menjadi tanggung jawab BPS baik itu dari sisi pelaksanaan serta pengembangannya. Beberapa pembaharuan terhadap aplikasi dan Survey web monitoring telah dilakukan untuk menyempurnakan survey yang telah dibangun BPPT sebelumnya. Selain itu, pembaharuan juga dilakukan untuk mengakomodir beberapa kendala/kekurangan yang terjadi pada survei tersebut.

Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Cakupan Pendataan survei pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode KSA tahun 2023 dilakukan untuk komoditas padi dan jagung. Pelaksanaan KSA 2023 komoditas padi dilakukan di pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan kegiatan KSA2022. Sedangkan pelaksanaan KSA 2023 komoditas jagung dilakukan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali Kota Banjarmasin.

Kegiatan KSA baik komoditas padi ataupun komoditas jagung memiliki waktu pelaksanaan yang sama, yaitu 7 hari terakhir setiap bulan. Hal yang membedakan pada KSA komoditas padi dan jagung adalah jumlah dan fase pertumbuhan tanaman. KSA komoditas padi memiliki 9 subsegmen yang harus diamati sedangkan KSA komoditas jagung memiliki 4 subsegmen yang harus diamati. Untuk KSA Padi, petugas Cacah Sampel (PCS) adalah mitra sedangkan Petugas Pemeriksa Sampel (PMS) adalah pegawai BPS dan mitra. Setiap PCS memiliki tanggung jawab melakukan pendataan 3-8 segmen dan setiap PMS memiliki tanggung jawab mengawasi 3 PCS (untuk kasus tertentu jumlah PCS yang diawasi PMS disesuaikan dengan jumlah segmen pada wilayah kerjanya). Pada KSA komoditas jagung, semua PCS adalah mitra dan PMS adalah pegawai BPS. Setiap PCS memiliki tanggung jawab melakukan pendataan 6-10 segmen dan setiap PMS memiliki tanggung jawab mengawasi 3 PCS. Diseminasi survei ini terdiri atas Rilis BRS data luas panen dan produksi padi serta penyusunan publikasi di akhir tahun 2024. Pagu anggaran untuk kegiatan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2024 adalah sebesar Rp242.119.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.041.000,00 (99,14%).

3.5. Analisis Capaian Kinerja PK Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

3.5.1. Perjanjian Kerja Suplemen

Pada tahun 2024 terdapat PK Suplemen yang menjadi IKU Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut yang terbagi kedalam 3 Tujuan dan Sasaran Strategis. Pada Tujuan pertama “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan” dan Sasaran pertama “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Suplemen yaitu Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota, Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota, dan Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” dan Sasaran “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Suplemen yaitu Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah. Serta pada Tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” dan sasaran “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” terdapat 2 (dua) Indikator kinerja suplemen yaitu Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dan Nilai Kinerja Anggaran minimal “Baik”.

Tabel 3. 16 Perjanjian Kinerja Suplemen 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96	99,87	104,03
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	85	81,99	110,71
	Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota	Persen	100	72,73	72,73
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah	Poin	1,8	2,25	120
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)	Persen	100	100	100
	Nilai Kinerja Anggaran minimal "Baik".	Poin	81	99,72	120

3.5.2. Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”. Tujuan pertama ini menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka penyediaan data statistik yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dan mempunyai 3 (tiga) indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama tersebut disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 17 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama PK Suplemen BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96	99,87	104,03
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	85	94,10	110,71
	Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota	Persen	100	72,73	72,73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1					95,82

Berdasarkan Tabel 3.16, tujuan strategis pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :

1. Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota.

Capaian indikator “Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota” diukur berdasarkan hasil response rate pada survei dengan sampel berbasis rumah tangga. Beberapa hasil response rate kegiatan yang berbasis rumah tangga antara lain Sakernas Februari, Susenas Maret, Sakernas Agustus, dan Seruti Triwulan I 2024. Kendala yang dihadapi adalah responden yang jenuh terhadap banyaknya survei yang dilaksanakan. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota:

$$(x/y)*100\%$$

dimana:

x = Jumlah sampel berbasis rumah tangga pada satker BPS Kabupaten Tanah Laut yang berhasil di data

y = Jumlah sampel berbasis rumah tangga pada satker BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3. 18 Rekapitulasi target dan realisasi survei berbasis rumah tangga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi Sampel	Non Response	Response Rate
1	Sakernas Februari	150	149	1	99,33%
2	Susenas Maret	660	660	0	100,00%
3	Sakernas Agustus	596	595	1	99,83%
4	Seruti Tw I	150	150	0	100,00%
Response Rate Berbasis Rumah Tangga		1554	1552	2	99,87%

Target Indikator sasaran strategis (IKS) pertama dari tujuan pertama ini pada tahun 2024 ditetapkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 96 persen. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang terdapat pada tabel 3.17, realisasi indikator sasaran strategis pertama pada tujuan pertama ini sebesar 99,87 persen sehingga capaian kinerja indikator kinerja pertama adalah sebesar 104,03 persen. Dengan demikian, indikator sasaran strategis pertama dapat tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

1. Responden yang jenuh terhadap banyaknya survei yang dilaksanakan.
2. Terdapat beberapa Blok Sensus alokasi awal yang sulit dijangkau.
3. Penggunaan FASIH bagi petugas belum maksimal, petugas memiliki kecenderungan untuk mendata menggunakan bantuan kuesioner/kertas terlebih dahulu dilanjutkan menginput saat di rumah. Hal ini menyebabkan keterlambatan submit pada aplikasi FASIH.
4. Beberapa data missing seperti setelah masuk ke server FASIH.

Beberapa strategi serta Solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain:

1. Menjelaskan kepada responden manfaat dan kegunaan data dari survei yang sedang dilaksanakan.
2. Mengajukan perubahan Blok Sensus (BS) dengan mempertimbangkan kondisi geografisnya.
3. Terus melakukan monitoring setiap 2 hari sekali untuk mengingatkan petugas segera melakukan submit pada aplikasi FASIH.
4. Melakukan backup data FASIH secara berkala.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Melakukan pembuatan laporan kegiatan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya jika menemui kendala yang sama.
2. Melakukan internalisasi SOP kegiatan kepada pegawai agar pelaksanaan monitoring dan pengawasan di setiap tahapan kegiatan di tahun mendatang sesuai SOP.
3. Melakukan reviu SOP secara berkala agar dapat menyesuaikan perubahan kondisi terbaru.
4. Melakukan evaluasi data yang dihasilkan pada periode survei sebelumnya agar data hasil pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat lebih berkualitas.

2. Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota

Capaian indikator “Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota” diukur berdasarkan hasil response rate pada survei dengan sampel berbasis usaha. Pada triwulan IV tahun 2024 terdapat 49 kegiatan survei berbasis usaha yang telah dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota:

$$(x/y)*100\%$$

dimana:

x = Jumlah sampel berbasis usaha pada satker BPS Kabupaten Tanah Laut yang berhasil didata

y = Jumlah sampel berbasis usaha pada satker BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi indikator kedua untuk sasaran strategis pertama pada tujuan pertama ini sebesar 94,1 persen. Selama tahun 2024 terdapat 49 kegiatan survei berbasis usaha yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran strategis kedua tercapai sebesar 110,71 persen.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

- Pemasukan dokumen bergantung pada kesediaan perusahaan untuk memberikan data serta kesibukan penanggungjawab data di Perusahaan.

Beberapa strategi serta Solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggungjawab data di perusahaan agar pendataan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal;
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melengkapi data yang diperlukan, terutama untuk perusahaan *non response*.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

- Melakukan penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan catatan agar dapat meningkatkan nilai *response rate* pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.
- Menjalin kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut agar dapat menjalin komunikasi kepada perusahaan yang menjadi sampel agar dapat memberikan jawaban dari survei yang dilakukan oleh BPS.
- Menjalin komunikasi dan mengunjungi responden khususnya perusahaan agar dapat lebih terbuka dalam memberikan jawaban atas kegiatan survei yang dilakukan BPS.

3. Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota

Capaian indikator “Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota” diukur berdasarkan rilis BRS yang telah diunggah melalui website serta media sosial. Pada Triwulan IV Tahun 2024 rilis BRS dapat dilaksanakan tepat waktu dengan rilis pada website serta recording melalui Youtube. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah seluruh tim teknis di BPS Kabupaten Tanah Laut. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota:

$$(x/y)*100\%$$

Dimana:

x = Jumlah rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut.

y = Jumlah rilis BRS yang dilakukan.

Realisasi indikator sasaran strategis pertama dari tujuan pertama ini pada tahun 2024 adalah sebesar 72,73 persen dari target yang ditetapkan, yaitu

sebesar 100 persen. Dengan demikian, capaian indikator sasaran strategis pertama dari tujuan kedua telah tercapai sebesar 72,73 persen.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

1. Bahan/data untuk penyusunan bahan rilis diberikan pada waktu yang berdekatan dengan tanggal rilis.
2. Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut tidak dapat secara langsung melaksanakan rilis karena sedang sakit.

Beberapa strategi serta solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain:

1. Melakukan penyusunan bahan rilis berupa BRS dengan segera.
2. Melakukan rilis BRS diwakilkan oleh Statistisi Ahli Madya dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Melakukan penyusunan laporan kegiatan rilis BRS sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya.

3.5.3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis, yaitu “Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I”.

Tabel 3. 19 Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS3.1 Penguatan Statistik Sektor sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah	Poin	1,8	2,25	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3					110

Fokus utama pada tujuan ketiga ini adalah peran serta BPS memberikan pelayanan prima dalam bentuk pembinaan kepada K/L/D/I terkait di wilayah kerjanya agar mampu menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Sesuai dengan sasaran strategisnya ditetapkan 1 indikator sasaran strategis, yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik”. Capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga tersebut disajikan pada Tabel 3.18.

Berdasarkan Tabel 3.18, tujuan strategis ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” mempunyai satu sasaran strategis yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah dapat melakukan submit penilaian EPSS di wilayahnya secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. BPS Kabupaten Tanah Laut berperan dalam melakukan pembinaan dalam statistik sektoral. Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS RI no. B-180/02000/TS.160/2024, tentang penyelenggaraan EPSS disampaikan bahwa Rangkaian kegiatan EPSS 2024 akan dimulai pada bulan April 2024 yang diawali dengan tahapan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama periode April-Mei 2024. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilakukan penilaian EPSS Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut oleh TPB. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional BPS Kabupaten Tanah Laut. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota:

$$(x/y)*100\%$$

Dimana:

x = Jumlah persentase capaian submit EPSS yang tepat waktu di wilayah BPS Kabupaten Tanah Laut

y = Jumlah Pemerintah Daerah di wilayah BPS Kabupaten Tanah Laut.

Realisasi dari indikator pertama pada sasaran strategis dari tujuan ketiga sebanyak 1 (satu) Pemerintah Daerah telah melakukan submit EPSS yang tepat waktu dari 1 (satu) Pemerintah Daerah yang menjadi target. Berdasarkan tabel 3.18, target indikator pertama sasaran strategis pertama dari tujuan ketiga telah tercapai 100 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan ketiga sebesar 100 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” telah tercapai.

Analisis permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

1. Timeline waktu penilaian oleh Tim Penilai Badan/TPB sangat singkat.
2. Ketentuan penilaian terus berubah terutama setelah dilakukan pleno provinsi dan pleno pusat.

Solusi dan strategi yang dilakukan BPS dalam mencapai tujuan ini antara lain:

1. Melakukan pembagian indikator-indikator penilaian yang dikerjakan oleh 3 orang TPB.
2. Terus melakukan perbaikan penilaian agar sesuai dengan ketentuan.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Melakukan pencatatan hal-hal penting dan poin-poin evaluasi untuk kegiatan EPSS tahun selanjutnya, sehingga tidak menjadi kesalahan yang berulang.

2. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah

Target pada tahun 2024 diperoleh berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-386/jg/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada Pemerintah Daerah Tanah Laut sebesar 1,77 poin ditambahkan perkiraan realisasi sebesar 0,03 poin. Oleh karena itu, target Perjanjian Kinerja (PK) Suplemen pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,8 poin. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah diperoleh dari hasil penilaian EPSS di wilayah pemerintah daerah. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-688/01000/ES/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah 2,25 dengan predikat “Cukup”. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Kabupaten Tanah Laut adalah kelompok fungsional BPS Kabupaten Tanah Laut. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah:

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.20

Tabel 3. 20 Tingkat Kematangan dan Kriteria EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 3.21

Tabel 3. 21 Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
4,2 – 5.0	Memuaskan
3.5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

Realisasi dari indikator kedua pada sasaran strategis dari tujuan ketiga yaitu Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh 2,25 poin dari target 1,8 poin. Berdasarkan tabel 3.19, target indikator kedua sasaran strategis pertama dari tujuan ketiga telah tercapai 120 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” telah tercapai.

Analisis permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Walidata maupun Produsen Data di SKPD yang dibarengi dengan kesibukan masing-masing sehingga pengumpulan bukti dukung EPSS kurang maksimal

Solusi dan strategi yang dilakukan BPS dalam mencapai tujuan ini antara lain:

1. Melakukan Bimbingan Teknis terkait EPSS serta membantu pembuatan daftar bukti dukung yang seharusnya dikumpulkan baik oleh Walidata maupun Produsen Data.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Penyerahan hasil IPS 2024 kepada Pemda Tanah Laut sekaligus koordinasi terkait rencana pembangunan statistik sektoral tahun depan.

3.5.4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis, yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan keempat ini mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Untuk mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat tersebut disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3. 22 Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)	Persen	100	100	100
	Nilai Kinerja Anggaran minimal "Baik"	Poin	81	99,72	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4					110

Berdasarkan Tabel 3.14, tujuan strategis keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” mempunyai satu sasaran strategis yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)

Proses untuk memperoleh predikat WBK/WBBM memerlukan beberapa tahapan terlebih dahulu seperti pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh masing-masing satuan kerja (satker), proses evaluasi oleh TPP, hingga penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). BPS Kabupaten Tanah Laut telah mengikuti pembinaan pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu, telah dilakukan pengisian LKE secara mandiri dan telah dikirimkan kepada TPP. Berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-34/08000/PW.100/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Tambahan Bahan Evaluasi ZI Tahun 2024. BPS Kabupaten Tanah Laut termasuk ke dalam satuan kerja yang akan diusulkan ke TPN. Sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 502 Tahun 2024 Tanggal 9 Agustus 2024, BPS Kabupaten Tanah Laut berhasil meraih predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Tim Penilai Internal (TPI). Penanggung jawab di BPS Kabupaten Tanah Laut untuk indikator ini adalah Subbagian Umum.

Realisasi dari indikator pertama pada sasaran strategis pertama pada tujuan keempat yaitu Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) adalah 100 persen. Hal ini karena BPS Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan predikat WBK dari TPI. Berdasarkan hal tersebut, target indikator kedua sasaran strategis pertama dari tujuan ketiga telah tercapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” telah tercapai.



Gambar 3. 3 Piagam Penghargaan WBK Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Tim Penilai Internal

Analisis permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 untuk mencapai IKS ini antara lain:

1. Kendala yang hadapi antara lain masih terdapat kesulitan dalam pemenuhan beberapa dokumen sumber berdasarkan hasil evaluasi TPP.
2. Solusi dan strategi yang dilakukan BPS dalam mencapai tujuan ini antara lain:
3. Mengumpulkan dokumen sumber tambahan sesuai hasil evaluasi dari TPP yang mendukung pengisian LKE ZI.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Melakukan pengelolaan dokumen sumber yang lebih sistematis sehingga dapat lebih mudah dalam pengumpulan bukti dukung LKE ZI tahun depan.

2. Nilai Kinerja Anggaran minimal "Baik"

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai gabungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran bersumber dari SMART Kemenkeu berdasarkan kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Berdasarkan nilai dari SMART Kemenkeu, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 37,5 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 49,72. Nilai Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut sebesar 99,72 dan masuk kategori "Sangat Baik". Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran}$$

Pada tahun 2024, indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 81 persen. Target tersebut didasarkan pada realisasi IKS ini pada tahun 2023. Berdasarkan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebesar 99,72. Dengan demikian, capaian kinerja Kinerja Anggaran minimal "Baik" sebesar 120 persen.

Adapun permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dari IKS ini adalah sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan lebih banyak pada semester 2 sehingga sulit untuk memenuhi serapan anggaran triwulan I.
2. TUP akhir tahun masih terdapat pengembalian belanja.

Solusi dan strategi yang diterapkan dalam pencapaian IKS ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan pada triwulan I untuk pemenuhan target serapan anggaran.
2. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran akhir tahun dengan pengadaan barang dan jasa yang penting untuk dilaksanakan

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKS ini adalah:

1. Menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaa anggaran dan sebagai bahan saran untuk pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Tabel 3.13, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan keempat pada tahun 2024 mencapai 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” dengan sasaran strategis “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” hampir tercapai.

Dengan total nilai capaian kinerja PK Suplemen seluruh tujuan sebesar 103,92 persen menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai pada Tahun 2024.

3.6. Prestasi BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Pada tahun 2024, BPS Kabupaten Tanah Laut juga terus berupaya dapat ditetapkan sebagai satker WBK di lingkungan BPS dan telah mendapat penghargaan internal BPS maupun eksternal sebagai berikut:

➤ Eksternal

Beberapa penghargaan yang diraih BPS Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Terbaik III** dalam Penggunaan *Cash Management System (CMS)* Periode Semester I Tahun 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pelaihari.



2. **Terbaik II** dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pelaihari.



3. **Terbaik III** dalam Penggunaan *Cash Management System* (CMS) Periode Tahun Anggaran 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pelaihari.



4. **Terbaik III** dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Tahun Anggaran 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pelaihari.



➤ Internal (BPS RI)

1. **Terbaik III** dalam Kinerja Akurasi Perencanaan Pelaksanaan Anggaran TA 2023 Satun Kerja BPS se-Kalimantan Selatan.



2. Penghargaan sebagai Satuan Kerja BPS dengan Kinerja Kegiatan dan Kualitas Data Podes **Terbaik III** Tahun Anggaran 2024. Diberikan pada 15 Januari 2025 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



3. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Kolaboratif dalam penyusunan PDRB dan respon Survei Neraca Pengeluaran **Terbaik III** Tahun Anggaran 2024. Diberikan pada 15 Januari 2025 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



4. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Kolaboratif dalam penyusunan PDRB dan respon Survei Neraca Produksi Terbaik II Tahun Anggaran 2024. Diberikan pada 15 Januari 2025 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



5. Penghargaan sebagai Satuan Kerja BPS dengan Kinerja Kegiatan dan Kualitas Sakernas Terbaik III Tahun Anggaran 2024. Diberikan pada 15 Januari 2025 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



BPS Kabupaten Tanah Laut akan terus berupaya untuk mencapai prestasi sebagai upaya pencapaian kinerja yang sudah menjadi keharusan sebagai suatu satker yang terukur dinilai baik dari internal maupun eksternal BPS. Upaya tersebut tentunya perlu didukung oleh kerja sama dari seluruh pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkannya.

3.7. Inovasi BPS Kabupaten Tanah Laut

Dalam mewujudkan capaian kinerja, BPS Kabupaten Tanah Laut telah mengembangkan berbagai inovasi, antara lain:

Petis Wenak

Pada era informasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, pengusaha/pebisnis, bahkan masyarakat umum. Mengingat kebutuhan akan data strategis yang tinggi maka penyajian data strategis yang *up to date* sangat diperlukan. Penyajian data strategis terbaru yang belum tersedia dan aksesnya yang belum terpusat pada satu produk membuat sedikit kesulitan ketika terdapat konsumen data yang membutuhkan data strategis tertentu. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui data yang semakin mudah diakses terutama data strategis. Data strategis sering dibutuhkan baik internal BPS maupun pengguna data BPS dengan waktu akses yang singkat dan mudah. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Tanah Laut membuat sebuah inovasi yaitu **Penyajian Data Strategis Berbasis Website dan Aplikasi (Petis Wenak)**.

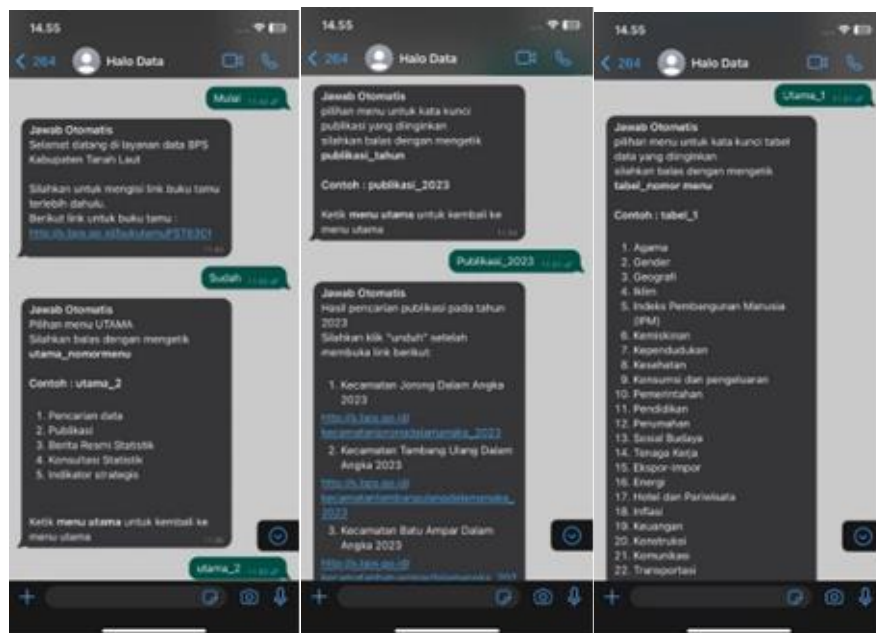


Gambar 3. 4 Petis Wenak Kabupaten Tanah Laut

Whatsapp Bot Layanan Data

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Tanah Laut telah berjalan cukup baik namun ada beberapa pengguna data menghubungi salah satu pegawai yang dikenal di BPS Kabupaten Tanah Laut melalui chat atau telepon pribadi. Hal ini karena ingin cepat untuk memperoleh data ataupun tidak mengerti cara mengakses data pada website. Selain itu, hasil Survei Kebutuhan Data terdapat saran dan masukan menginginkan adanya akun khusus atau contact person melalui WhatsApp agar dapat memudahkan pengguna data.

BPS Kabupaten Tanah Laut melakukan “Pembuatan WhatsApp Bot Pelayanan Statistik Terpadu”. Gagasan tersebut berupa membuat sebuah akun khusus untuk pelayanan data dengan WhatsApp bot yaitu balasan dengan otomatis yang tersinkronisasi dengan spreadsheet agar pelayanan data PST BPS Kabupaten Tanah Laut bersifat mudah dan cepat. Pembuatan WhatsApp Bot untuk pelayanan data ini merupakan gagasan baru yang ada BPS Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu digunakan BPS Kabupaten Tanah Laut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat memudahkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam memperoleh data.

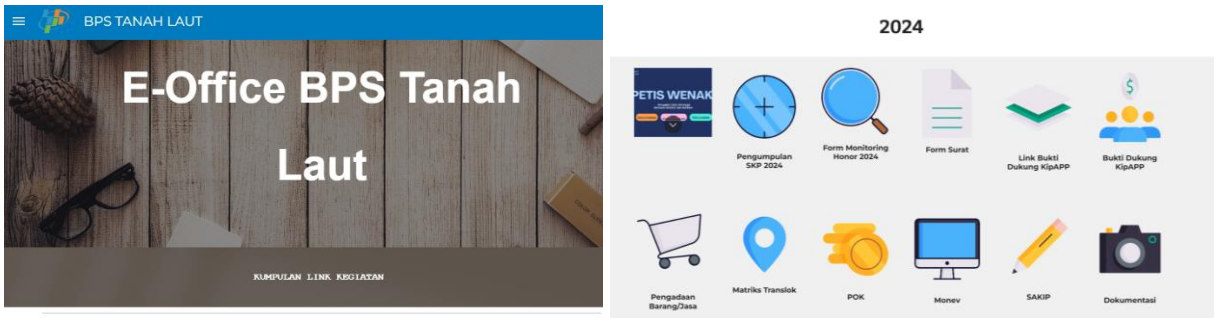


Gambar 3. 5 Layanan WhatsApp Bot BPS Kabupaten Tanah Laut

E-office BPS Tanah Laut

Dukungan untuk internal BPS Kabupaten Tanah Laut sangat dibutuhkan seiring dengan beragamnya kegiatan dan pelaporan yang harus dilakukan baik dari sisi teknis maupun administrasi. Dalam rangka memudahkan aksesibilitas dan kolaborasi maka dibuat satu laman website yang memuat berbagai keperluan perkantoran. Buku Surat

Keluar dan Masuk, Matriks Honor Petugas, Pelaporan Capaian Kinerja, dan berbagai petunjuk peraturan yang berlaku dijadikan dalam satu tempat yang terintegrasi. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Tanah Laut mengembangkan E-Office BPS Tanah Laut.



Gambar 3. 6 Layanan *E-Office* BPS Kabupaten Tanah Laut

3.8. Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

3.8.1. Histori Revisi Anggaran

Pada tahun 2024, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Pagu Alokasi Awal sebesar Rp 6.291.943.000,00 dan pada akhir periode pagu menjadi sebesar Rp6.244.941.000, termasuk blokir anggaran sebesar Rp399.855.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Histori Revisi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Uraian	Sumber Dana	2024	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen		4.359.721.000	4.422.460.000
Belanja Pegawai	RM	3.660.256.000	3.587.277.000
Belanja Barang	RM	699.465.000	761.683.000
Belanja Modal	RM	-	73.500.000
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		1.932.222.000	1.822.481.000
Belanja Barang	RM	1.932.222.000	1.822.481.000
Belanja Modal	RM	-	-
Jumlah Belanja		6.291.943.000	6.244.941.000

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut, maka dilakukan beberapa kali penyesuaian DIPA Awal Nomor SP DIPA-054.02.2.428590/2023 tanggal 30 November 2023. Sampai akhir periode TA 2023 terdapat 12 Revisi DIPA dengan penjelasan sebagai berikut:

➤ **Revisi DIPA I**

(Automatic Adjustment)

Revisi DIPA pertama satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Januari 2024 merupakan revisi kewenangan DJA dalam rangka melakukan Automatic Adjustment untuk belanja pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (pelaksanaan kegiatan Statistik Distribusi, Statistik Harga, Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Sensus Pertanian) berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-0034/63510/PR.440/2024 Tanggal 8 Januari 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2024. BPS Kabupaten Tanah Laut melakukan pencadangan anggaran sebesar uraian berikut:

Tabel 3. 24 Nilai Blokir Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Program	Nilai Blokir (Rp)
Program Dukungan Manajemen	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	428.992.000
Total	428.992.000

➤ **Revisi DIPA II**

(Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan I)

Revisi DIPA ke dua satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Februari 2024 merupakan revisi administrasi terkait penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA (RPD) melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) untuk periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

➤ **Revisi DIPA III**

(Penyesuaian Anggaran Kegiatan)

Revisi DIPA ke tiga satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 5 April 2024 merupakan revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan penambahan detail keterpaduan anggaran dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-0559/63510/PR.440/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024. Pada revisi penyesuaian anggaran kegiatan, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.266.000, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Belanja Barang (52)

BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 14.790.000 terkait pembiayaan kegiatan Layanan Umum.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Belanja Barang (52)

BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.056.000 berupa belanja barang untuk pelaksanaan beberapa kegiatan survei dan sensus berdasarkan dasar hitung yang dikirimkan oleh BPS RI pada lampiran surat diatas.

Perubahan PAGU dari pagu awal Rp 6.291.943.000 menjadi Rp 6,245,677,000

➤ **Revisi DIPA IV**

(Pemutakhiran POK dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan II)

Revisi DIPA ke empat satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 April 2024 merupakan revisi pemutakhiran data POK dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan II melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) terkait penyesuaian anggaran pelaksanaan dalam hal pagu anggaran tetap dan Rencana Penarikan Dana untuk periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

➤ **Revisi DIPA V**

(Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA – Triwulan II)

Revisi DIPA ke lima satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 29 Mei 2024 merupakan revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan II (Mei dan Juni) melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) terkait Rencana Penarikan Dana untuk periode Triwulan II (Mei dan Juni) Tahun Anggaran 2024.

Nilai anggaran terakhir BPS kabupaten Tanah Laut sebesar 6.245.677.000 dengan sumber dana sepenuhnya merupakan Rupiah Murni. Rincian anggaran terakhir BPS kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Rincian Anggaran Terakhir BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.871.166.000	523.400.434	27,97
Dukungan Manajemen	4.374.511.000	2,388,333,680	54,59
Jumlah	6.245.677.000	2.911.734.114	46,61

➤ **Revisi DIPA VI**

(Pemutakhiran POK dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan III)

Revisi DIPA ke enam satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Juli 2024 merupakan revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan III (Juli – September 2024) melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) terkait Rencana Penarikan Dana untuk periode Triwulan III (Juli sd September 2024) Tahun Anggaran 2024.

➤ **Revisi DIPA VII**

(Penyesuaian Anggaran Kegiatan)

Revisi DIPA ke tujuh satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Agustus 2024 merupakan revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan mempertimbangkan relaksasi rasionalisasi dan pembukaan blokir Automatic Adjustment untuk kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-1436/63510/PR.440/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024. Pada revisi penyesuaian anggaran kegiatan, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.741.000, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Belanja Barang (52)

BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 90.428.000 terkait pembiayaan kegiatan Gaji dan Tunjangan.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Belanja Barang (52)

BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.687.000 berupa belanja barang untuk pelaksanaan beberapa kegiatan survei dan sensus berdasarkan dasar hitung yang dikirimkan oleh BPS RI pada lampiran surat diatas.

Perubahan PAGU dari pagu awal Rp 6.245.677.000 menjadi Rp 6,326,418,000

➤ **Revisi DIPA VIII**

(Penyesuaian Anggaran Kegiatan)

Revisi DIPA ke delapan satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 September 2024 merupakan revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan mempertimbangkan relaksasi rasionalisasi sepenuhnya

dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-1698/63510/PR.440/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024. Pada revisi penyesuaian anggaran kegiatan, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.998.000 berupa belanja barang untuk pelaksanaan beberapa kegiatan survei dan sensus berdasarkan dasar hitung yang dikirimkan oleh BPS RI pada lampiran surat diatas.

Perubahan PAGU dari pagu awal Rp 6,326,418,000 menjadi Rp 6,287,420,000.

➤ **Revisi DIPA IX**

(Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA – Triwulan IV)

Revisi DIPA ke sembilan satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 14 Oktober 2024 merupakan revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan IV (Oktober – Desember 2024) melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) terkait Rencana Penarikan Dana untuk periode Triwulan IV (Oktober – Desember 2024) Tahun Anggaran 2024.

➤ **Revisi DIPA X**

(Penyesuaian Anggaran Kegiatan)

Revisi DIPA ke sepuluh satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 5 November 2024 merupakan revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-1931/63510/PR.440/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024. Pada revisi penyesuaian anggaran kegiatan, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.479.000 berupa belanja barang dan pegawai untuk pelaksanaan kegiatan operasional kantor, gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan dasar hitung yang dikirimkan oleh BPS RI pada lampiran surat diatas. Pada revisi ini BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi pagu belanja modal berupa pengadaan laptop sebesar Rp 73.500.000 yang termasuk dalam program Dukungan Manajemen.

Perubahan PAGU dari pagu awal Rp 6,287,420,000 menjadi Rp 6,244,941,000

Nilai anggaran BPS kabupaten Tanah Laut sebesar 6,244,941,000 dengan sumber dana sepenuhnya merupakan Rupiah Murni. Rincian anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Rincian Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Revisi ke-10

Program	Anggaran (Rp)
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.822.481.000
Dukungan Manajemen	4,422,460,000
Jumlah	6,244,941,000

➤ **Revisi DIPA XI****(Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024)**

Revisi DIPA ke sebelas satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 November 2024 merupakan revisi kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran tetap, sesuai dengan surat Kepala BPS RI Nomor : B-939/02000/PR.400/2024 tanggal 13 November 2024 dan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-2114/63510/PR.440/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024. Pada revisi ini, BPS Kabupaten Tanah Laut diharuskan melakukan blokir pagu perjalanan dinas sebesar Rp. 55.421.000. Pagu tetap sebesar Rp 6,244,941,000

➤ **Revisi DIPA XII****(Revisi Administrasi)**

Revisi DIPA ke dua belas satker BPS Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2024 merupakan revisi administrasi untuk Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan IV (Oktober – Desember 2024) melalui kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) terkait Rencana Penarikan Dana dan Realisasi untuk periode Triwulan IV (Oktober – Desember 2024) Tahun Anggaran 2024.

Nilai anggaran BPS kabupaten Tanah Laut sebesar 6,244,941,000 dengan sumber dana sepenuhnya merupakan Rupiah Murni. Rincian anggaran BPS kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Rincian realisasi anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Revisi ke-12

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.822.481.000	1,392,659,187	76,41
Dukungan Manajemen	4,422,460,000	4,374,579,442	98,91
Jumlah	6,244,941,000	5,767,238,629	92,32

3.8.2. Realisasi Anggaran Per Tujuan/Sasaran Strategis

Pagu Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut pada revisi terakhir berjumlah Rp6.244.941.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp399.855.000,00. Realisasi anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar Rp5.767.238.629 atau 92,25 persen. Jika realisasi dihitung berdasarkan pagu tanpa blokir maka berdasarkan informasi dari Monev BPS yang bersumber dari laporan realisasi FA Detil di SAKTI dengan pagu sebesar Rp5.845.086.00,00 dan realisasi sebesar Rp5.767.238.629 atau 98,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target realisasi anggaran sebesar 95 persen dimana tertuang dalam perjanjian Kepala Sub Bagian Umum telah tercapai. Pagu dan realisasi anggaran per tujuan/sasaran strategis secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel 3. 28 Pagu dengan blokir, Realisasi, dan Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Output	Capaian Kinerja Kumulatif (%)	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran Kumulatif (Rp)				Realisasi Anggaran Kumulatif (%)				Nilai Efisiensi Sasaran
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.1. Meningkatkan Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		100	1.782.729.000	174.676.600	506.498.434	965.453.799	1.354.354.425	9,80	28,41	54,16	75,97	100,00
		2896.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		600.000	-	-	0	0	-	-	-	-	-
		2898.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		36.099.000	-	3.515.000	20.813.000	24.730.105	-	9,74	57,66	68,51	-
		2898.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		1.350.000	-	-	190.000	950.000	-	-	-	14,07	70,37
		2899.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		12.812.000	165.000	330.000	5.135.000	12.432.099	1,29	2,58	40,08	97,03	-
		2900.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		2.490.000	-	-	1.549.000	2.459.000	-	-	-	62,21	98,76
		2902.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		29.238.000	-	1.649.200	6.154.200	9.008.894	-	5,64	21,05	30,81	-
		2902.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		9.698.000	-	-	7.471.000	7.471.000	-	-	-	-	-
		2903.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		220.989.000	21.656.000	59.088.570	82.280.570	154.047.309	9,80	26,74	37,23	69,71	-
		2904.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		49.239.000	1.705.000	7.588.000	14.228.000	28.607.000	3,46	15,41	28,89	58,10	-
		2905.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		167.691.000	19.178.000	22.580.000	148.267.050	157.682.050	11,44	13,47	88,42	94,03	-
		2906.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		368.416.000	93.926.600	210.649.100	287.205.100	362.921.988	25,49	57,18	77,96	98,51	-
		2907.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		107.455.000	-	60.957.000	96.982.000	100.322.000	-	56,73	90,25	93,36	-
		2908.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		27.715.000	1.430.000	4.775.000	13.119.000	24.846.401	5,16	17,23	47,34	89,65	-
		2908.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		8.079.000	-	-	0	6.053.000	-	-	-	74,92	-
		2909.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		4.474.000	-	-	0	2.790.000	-	-	-	62,36	-
		2910.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		144.294.000	-	-	1.482.000	16.682.000	-	-	-	11,56	-
		2910.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		582.090.000	36.616.000	135.366.564	280.579.879	443.351.579	6,18	22,86	47,39	74,88	-
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		99,29	23.326.000	9.375.000	9.375.000	16.375.000	23.084.300	40,19	40,19	70,20	98,96	50,82
		2897.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		23.326.000	9.375.000	9.375.000	16.375.000	23.084.300	40,19	40,19	70,20	98,96	-
T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1. Penguatan Statistik Sektorat K/L/D/I		120	16.426.000	0	7.527.000	7.527.000	15.220.462	-	45,82	45,82	92,66	100,00
		2897.BDB FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA		16.426.000	-	7.527.000	7.527.000	15.220.462	-	45,82	45,82	92,66	-
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		96,52	4.422.460.000	1.167.614.226	2.389.065.495	3.366.997.683	4.374.579.442	26,40	54,02	76,13	98,92	43,79
		Seluruh Program Dukungan Manajemen		4.422.460.000	1.167.614.226	2.389.065.495	3.366.997.683	4.374.579.442	26,40	54,02	76,13	98,92	-

Tabel 3. 29 Pagu tanpa blokir, Realisasi, dan Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 tanpa blokir anggaran berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Output	Capaian Kinerja Kumulatif (%)	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran Kumulatif (Rp)				Realisasi Anggaran Kumulatif (%)				Nilai Efisiensi Sasaran
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		100	1.384.614.000	174.676.600	506.498.434	965.453.799	1.354.354.425	12,62	36,58	69,73	97,81	55,46
		2896.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		100.000	-	-	-	0	-	-	-	-	
		2898.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		25.024.000	-	3.515.000	20.813.000	24.730.105	-	14,05	83,17	98,83	
		2898.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		950.000	-	-	190.000	950.000	-	-	20,00	100,00	
		2899.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		12.435.000	165.000	330.000	5.135.000	12.432.099	1,33	2,65	41,29	99,98	
		2900.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		2.469.000	-	-	1.549.000	2.459.000	-	-	62,74	99,59	
		2902.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		9.936.000	-	1.649.200	6.154.200	9.008.894	-	16,60	61,94	90,67	
		2902.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		7.471.000	-	-	7.471.000	7.471.000	-	-	-	100,00	
		2903.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		167.562.000	21.656.000	59.088.570	82.280.570	154.047.309	12,92	35,26	49,10	91,93	
		2904.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		29.794.000	1.705.000	7.588.000	14.226.000	28.607.000	5,72	25,47	47,75	96,02	
		2905.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		158.006.000	19.178.000	22.580.000	148.267.050	157.682.050	12,14	14,29	93,84	99,79	
		2906.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		364.532.000	93.926.600	210.649.100	287.205.100	362.921.988	25,77	57,79	78,79	99,56	
		2907.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		102.572.000	-	60.957.000	96.982.000	100.322.000	-	59,43	94,55	97,81	
		2908.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		26.018.000	1.430.000	4.775.000	13.119.000	24.846.401	5,50	18,35	50,42	95,50	
		2908.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		7.058.000	-	-	-	6.053.000	-	-	-	85,76	
		2909.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		2.790.000	-	-	-	2.790.000	-	-	-	100,00	
		2910.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		20.902.000	-	-	1.482.000	16.682.000	-	-	7,09	79,81	
		2910.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		446.995.000	36.616.000	135.366.564	280.579.879	443.351.579	8,19	30,28	62,77	99,18	
T2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		99,29	23.320.000	9.375.000	9.375.000	16.375.000	23.084.300	40,20	40,20	70,22	98,99	50,76
		2897.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		23.320.000	9.375.000	9.375.000	16.375.000	23.084.300	40,20	40,20	70,22	98,99	
T3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I		120	15.326.000	0	7.527.000	7.527.000	15.220.462	-	49,11	49,11	99,31	93,10
		2897.BDB FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA		15.326.000	-	7.527.000	7.527.000	15.220.462	-	49,11	49,11	99,31	
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		96,52	4.421.826.000	1.167.614.226	2.389.065.495	3.366.997.683	4.374.579.442	26,41	54,03	76,14	98,93	43,75
		Seluruh Program Dukungan Manajemen		4.421.826.000	1.167.614.226	2.389.065.495	3.366.997.683	4.374.579.442	26,41	54,03	76,14	98,93	

Berdasarkan Tabel di atas, Pagu anggaran pada Tujuan/Sasaran Strategis pertama Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan sebesar Rp1.782.729.000 dengan realisasi sebesar Rp1.354.354.425 atau 75,97 persen. Jika melihat dengan pagu tanpa blokir sebesar Rp 1.384.614.000 dengan realisasi anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1.354.354.425 atau 98,14 persen. Dukungan anggaran tersebut berdampak positif terhadap capaian kinerja pada Tujuan/Strategis pertama sebesar 100 persen. Artinya bahwa, anggaran yang digunakan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut bermanfaat dalam meningkatkan pemanfaatan data statisik yang berkualitas.

Untuk Tujuan Strategis kedua, Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp23.326.000,00 realisasi anggaran sebesar 98,96 persen berdampak pada pencapaian kinerja sebesar 99,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

memberikan dampak positif berupa meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.

Pada Tujuan Sasaran Strategis ketiga, Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, BPS Kabupaten Tanah Laut mendapat alokasi pagu sebesar Rp16.426.000,00 dengan realisasi sebesar 92,66 persen. Walaupun realisasi anggaran pada Tujuan/Sasaran ini relative lebih kecil, namun dapat meningkatkan capaian kinerja sebesar 120 persen. Hal ini menunjukkan komitmen BPS Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN walaupun dengan alokasi anggaran yang relatif kecil.

Untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, BPS Kabupaten Tanah Laut menyediakan pagu sebesar Rp4.422.460.000 (termasuk belanja pegawai) dengan realisasi sebesar 98,92 persen. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja tujuan/sasaran menjadi 96,52 persen. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sudah sangat baik.

3.8.3. Efisiensi Anggaran di BPS Kabupaten Tanah Laut

Upaya Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan anggaran di BPS Kabupaten Tanah Laut senantiasa mengacu kepada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output berkualitas. Bentuk kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu prinsip 3E tersebut antara lain:

1. Melakukan pertemuan/rapat evaluasi secara daring Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rapat evaluasi yang melibatkan pegawai BPS Provinsi dan Kabupateb/kota dilakukan secara daring, dan pertemuan tatap muka dibuat lebih selektif.
2. Rapat FDG dilaksanakan di kantor. Dalam penyelenggaran rapat dan pertemuan dengan pemerintah daerah seperti FGD DDA dan FGD Metadata dan Statistik Sektoral, dilaksanakan di kantor, bukan berupa paket meeting.
3. Supervisi pelaksanaan kegiatan ke lapangan terintegrasi pada kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga setiap kunjungan menggunakan kendaraan dinas dapat dilaksanakan untuk beberapa kegiatan sekaligus. Hal ini berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan dinas.

4. Pengaturan suhu ruangan kerja di Kantor BPS Kabupaten Tanah Laut sekitar 24-26 derajat Celsius agar kinerja AC tidak terlalu berat sehingga dapat menekan biaya Listrik dari penggunaan pendingin ruangan.
5. Penggantian lampu TL menjadi Lampu Downlight hemat energi di ruang kerja. Dari segi penggunaan sumber daya lainnya dengan segera mematikan lampu ruangan setelah selesai digunakan.
6. Meniadakan pegawai PPNP dan menggunakan Tenaga Outsourcing untuk mendukung pelaksanaan perkantoran baik untuk Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan.

Selama tahun anggaran 2024, BPS Kabupaten Tanah Laut melakukan penghematan anggaran dalam bentuk *Automatic Adjustmen* anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel 3. 30 Refocusing Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Revisi	Jumlah Efisiensi	Keterangan
DIPA I	428.992.000	Revisi kewenangan DJA dalam rangka melakukan Automatic Adjustment untuk belanja pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik berdasarkan sura Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-0034/63510/PR.440/2024 Tanggal 8 Januari 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2024
(18 Januari 2024)		
DIPA III	46.266.000	Revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan penambahan detail keterpaduan anggaran dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-0559/63510/PR.440/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024
(5 April 2024)		
DIPA VIII	38.0998.000	Revisi kewenangan DJA dalam rangka penyusunan anggaran sesuai dasar hitung dengan mempertimbangkan relaksasi rasionalisasi sepenuhnya dengan pagu anggaran berubah, sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-1698/63510/PR.440/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024
(18 September 2024)		
DIPA X	42.479.000	

Revisi	Jumlah Efisiensi	Keterangan
(5 November 2024)		Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustment TA 2023 berdasarkan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-1931/63510/PR.440/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2024
DIPA XI	55.421.000	revisi kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran tetap, sesuai dengan surat Kepala BPS RI Nomor : B-939/02000/PR.400/2024 tanggal 13 November 2024 dan surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-2114/63510/PR.440/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024
(21 November 2024)		
Jumlah Efisiensi	954.156.000	

BPS Kabupaten Tanah Laut melaksanakan instruksi *automatic adjustment* atau penghematan dalam upaya untuk efisiensi, efektifitas anggaran baik dalam pemenuhan belanja pegawai, belanja tunjangan kinerja, dan penghematan yang diperlukan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun gambaran *automatic adjustment* Tahun 2022 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 31 Perbandingan Automatic Adjustment (AA) Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 - 2024

Program	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
Belanja Pegawai	AA	164.678.000	181.314.000	0
Belanja Barang	AA	370.481.000	470.854.000	399.855.000
Total	AA	535.159.000	652.168.000	399.855.000

Dari segi BPS juga melakukan penghematan penggunaan energi berupa penghematan penggunaan energi listrik, telepon dan air. Upaya penghematan ini diimplementasikan melalui himbauan melalui stiker yang ditempelkan untuk penghematan listrik serta air yang terus dilaksanakan hingga tahun 2024. Berikut perbandingan realisasi penggunaan anggaran daya dan jasa tahun 2022 - 2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3. 32 Perbandingan Penghematan dalam penggunaan Anggaran Belanja Daya dan Jasa BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2024

Daya dan Jasa	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
Biaya Langganan Listrik	Pagu Akhir	39.000.000	63.977.000	45.821.000
	Realisasi	38.485.737	60.864.395	45.036.405
	%	98,68	95,13	98,29
	Sisa Pagu	514.263	3.112.605	784.595
Biaya Langganan Telpon	Pagu Akhir	1.350.000	1.146.000	1.566.000
	Realisasi	1.143.174	1.145.592	1.128.979
	%	84,68	99,96	72,09
	Sisa Pagu	206.826	408	437.021
Biaya Langganan Air	Pagu Akhir	810.000	1.439.000	1.167.000
	Realisasi	766.500	836.500	915.000
	%	94,63	58,13	78,41
	Sisa Pagu	43.500	602.500	252.000
Total	Pagu Akhir	41.160.000	66.562.000	48.554.000
	Realisasi	40.395.411	62.846.487	47.080.384
	%	98,14	94,42	96,96
	Sisa Pagu	764.589	3.715.513	1.473.616

Tahun 2024, realisasi anggaran listrik sebesar 98,29 persen dari pagu sebesar Rp45.821.000,- dengan realisasi sebesar Rp45.036.405,-. Penggunaan Listrik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukup banyak yakni sebesar 35%. Hal ini karena pengolahan tidak sebanyak tahun sebelumnya yang terdapat kegiatan sensus. Selain itu, terjadi penghematan dari segi lampu ruang kerja yang sudah diganti menggunakan LED. Realisasi penggunaan telepon sebesar 72,09 persen dari pagu Rp. 1.566.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.128.979,- dan untuk penggunaan air realisasi sebesar 78,41 persen dari pagu sebesar Rp 1.167.000,- dengan realisasi sebesar Rp915.000,-. Upaya penghematan dengan melakukan himbuan melalui stiker yang ditempelkan untuk penghematan listrik serta air yang terus dilaksanakan hingga tahun 2024. Berdasarkan periode renstra BPS Kabupaten Tanah Laut, upaya penghematan terus dilakukan sejak dari tahun 2015 hingga akhir tahun renstra tahun 2019 dan dilanjutkan pada periode renstra 2020-2024. Berikut perbandingan realisasi penggunaan anggaran daya dan jasa tahun 2015-2019 dan 2020-2024 BPS Kabupaten Tanah Laut.

Nilai Efisiensi Anggaran

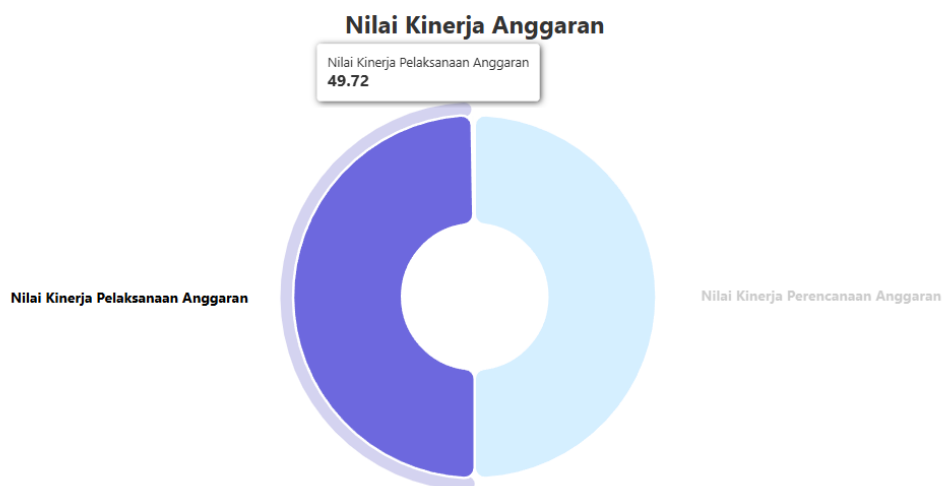
Berdasarkan pengukuran tabel efisiensi menurut tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 menunjukkan adanya efisiensi terhadap capaian target kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan perbandingan realisasi anggaran pada Tabel 23. Nilai efisiensi total BPS Kabupaten Tanah Laut TA 2024 berdasarkan perhitungan FRA sebesar 63,09 persen. Efisiensi pada FRA dihitung berdasarkan perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja per tujuan/sasaran. Jika dibandingkan antar Tujuan/Sasaran strategis, nilai efisiensi pada Tujuan/Sasaran pertama dan ketiga merupakan nilai efisiensi paling tinggi, yaitu mencapai 100 persen. Sedangkan pada tujuan/sasaran kedua sebesar 50,82 persen dan sasaran/tujuan ke empat sebesar 43,79 persen.

Tabel 3. 33 Perbandingan Efisiensi menurut Tujuan dan Sasaran Strategis
BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sasaran	Program	Pagu Dengan Blokir (Rp)	Pagu Tanpa Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Dengan Blokir%	Realisasi Tanpa Blokir %	Nilai Efisiensi dengan Blokir	Nilai Efisiensi tanpa Blokir
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.782.729.000	1.384.614.000	1.354.354.425	75,97	97,81	100,00	55,46
SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		23.326.000	23.320.000	23.084.300	98,96	98,99	50,82	50,76
SS3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		16.426.000	15.326.000	15.220.462	92,66	99,31	100,00	93,10
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL)	4.422.460.000	4.421.826.000	4.374.579.442	98,92	98,93	43,79	43,75
Total		6.244.941.000	5.845.086.000	5.767.238.629	92,35	98,67	63,09	46,87

Nilai Kinerja Anggaran

BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 memperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 50 poin dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 49,72 poin. Dengan demikian, Nilai kinerja anggaran tahun 2024 yang diperoleh oleh BPS Kabupaten Tanah Laut sebesar 99,72.



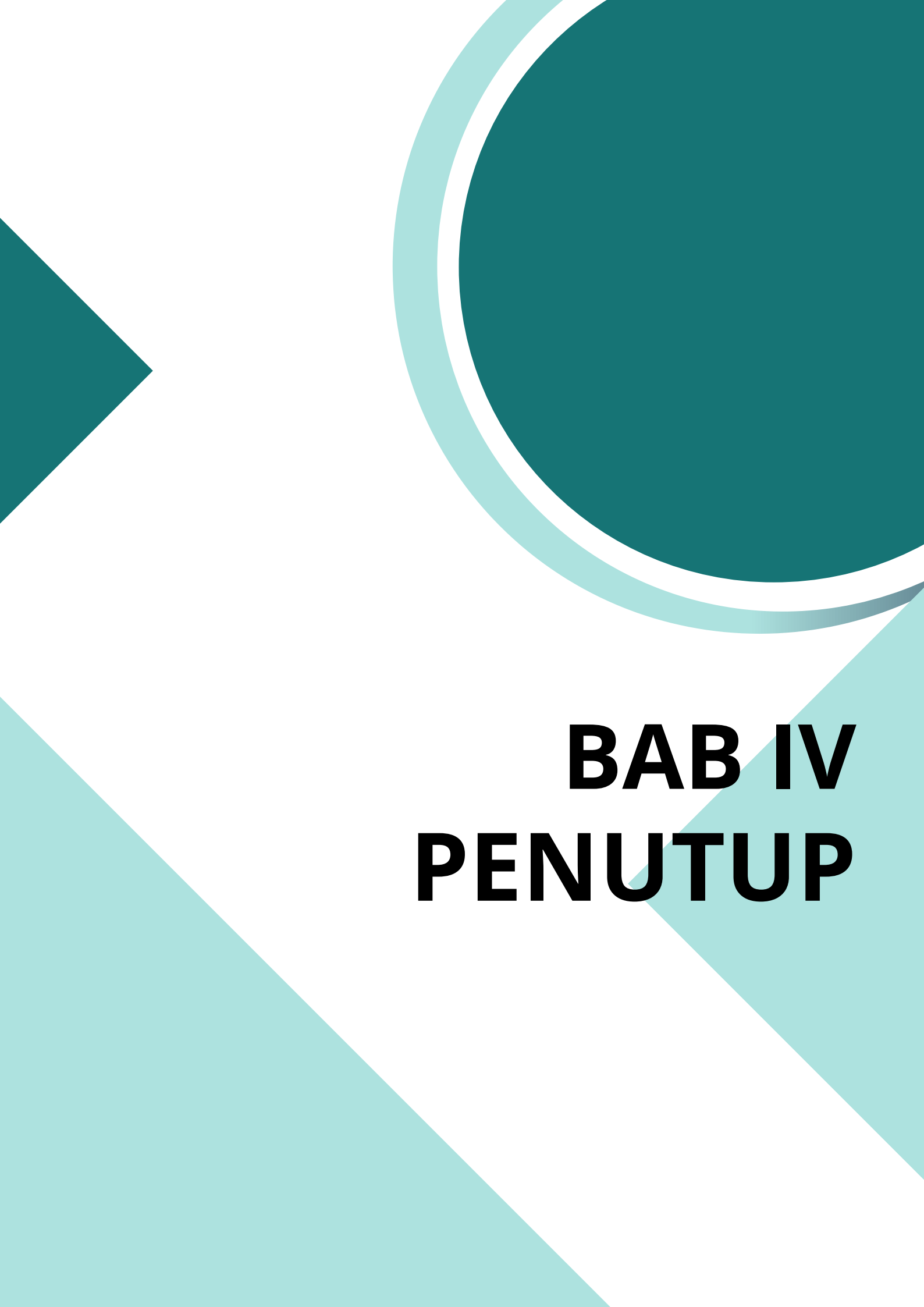
Gambar 3. 7 Nilai Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai Capaian RO dengan nilai yang diperoleh BPS Kabupaten Tanah Laut sebesar 100%. Sedangkan pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh dari beberapa komponen penilaian antara lain. Revisi DIPA, Deviasi Halaman 3 DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	168	054	428590	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TANAH LAUT	Nilai	100.00	100.00	98.12	100.00	100.00	98.03	100.00	99.43	100%	0.00	99.43	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.62	10.00	10.00	9.80	25.00					
					Nilai Aspek	100.00		99.04				100.00					

Gambar 3. 8 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Pada komponen penilaian Revisi DIPA, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output mendapatkan nilai 100. Sedangkan pada Penyerapan anggaran memperoleh nilai 98,12 dan pada Pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai 98,03. Sedangkan Dispensasi SPM tidak terdapat nilai pengurang yang diperoleh oleh BPS Kabupaten Tanah Laut.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

BPS Kabupaten Tanah Laut telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Dalam hal penyusunan dokumen kinerja mulai dari dokumen perencanaan ataupun dokumen anggaran hingga pengukuran dan evaluasi kinerja, BPS Kabupaten Tanah Laut telah bersinergi antar fungsi dan bagian melalui tim SAKIP yang telah dibentuk. Tim SAKIP yang beranggotakan perwakilan fungsi/bagian dibentuk untuk menampung aspirasi usulan maupun permasalahan yang dihadapi masing masing fungsi/bagian agar dapat terakomodir dan tersampaikan ke jajaran pimpinan.

Terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024, yaitu:

1. Tujuan pertama yaitu “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan indikator capaian tujuan strategis “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” mencapai 100 persen;
2. Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” dengan Indikator kinerja tujuan strategis “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” mencapai 99,29 persen;
3. Tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” dengan indikator tujuan strategis “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I” capaian kinerja 120 persen; dan
4. Tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” dengan capaian indikator tujuan strategis “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” capaian kinerjanya mencapai 96,52 persen.

4.2. Tindak Lanjut

Kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 dengan capaian kinerja tujuan strategis sebesar 101,66 persen dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101,66 persen. Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait belum maksimalnya pencapaian target beberapa indikator. Peningkatan kinerja bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun juga berupa penajaman indikator maupun target kinerja, sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain:

1. Dalam setiap capaian kinerja triwulan pada tahun berjalan, tidak hanya memperhatikan target PK melainkan renstra sebagai acuan keberhasilan capaian kinerja.
2. Meningkatkan dokumentasi dan bukti dukung kegiatan dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja.
3. Membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui website misalnya dengan terus memperbaharui fitur tabel statistik dengan data-data terbaru, memperbanyak infografis dan disebarakan melalui website ataupun sosial media resmi BPS Kabupaten Tanah Laut, rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS) melalui website, dan juga mensosialisasikan data BPS secara intensif khususnya kepada K/L/D/I yang ada di BPS Kabupaten Tanah Laut.
4. Berkoordinasi dengan subject matter di BPS Pusat terkait ketersediaan data RSE agar dapat dimunculkan dalam publikasi statistik di BPS untuk meningkatkan jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi di BPS Kabupaten Tanah Laut.
5. Meningkatkan kualitas publikasi dengan memperbanyak infografis, mempertajam analisis serta membuat layout yang semakin menarik.
6. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D/I serta wali data (Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Laut) sehingga diharapkan peran BPS sebagai Pembina statistik sektoral dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.
7. Melakukan pembinaan statistik khususnya statistik sektoral kepada pemerintah daerah.
8. Berkoordinasi di awal tahun dengan wali data yaitu Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Laut beserta K/L/D/I setempat, agar menghimbau kepada K/L/D/I di Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan usulan rekomendasi statistik untuk pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
10. Melakukan sosialisasi ataupun pembinaan terhadap pemerintah daerah ataupun instansi setempat terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
11. Memberikan pelayanan konsultasi statistik kepada pemerintah daerah yang bisa diakses melalui online maupun offline.
12. Menyediakan penjelasan yang lengkap kepada responden SKD agar mengetahui sarana prasarana baik secara fisik di BPS Kabupaten Tanah Laut maupun online di media sosial/website.
13. Membuat poster ataupun infografis terkait biaya pengaduan serta biaya pelayanan di PST serta mengumumkannya di Website dan media sosial lainnya melalui Halo Data dan fitur chat serta kotak pengaduan di PST
14. Membuat poster ataupun infografis terkait prosedur pengaduan di PST serta mengumumkannya di Website dan media sosial lainnya

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

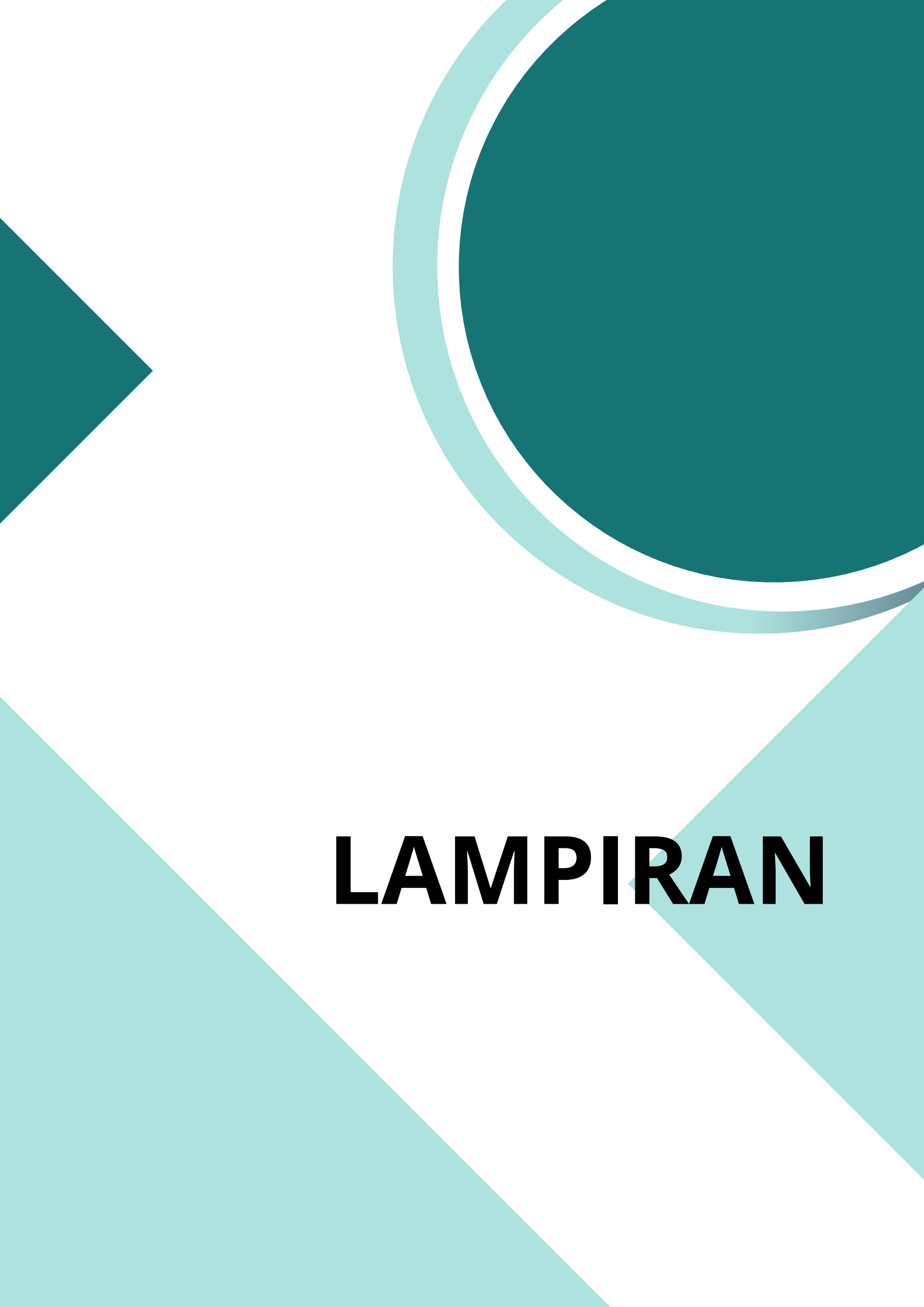
Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
SS1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	
1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Melakukan komunikasi kepada OPD secara berkala untuk menyampaikan informasi terkini mengenai data yang dihasilkan oleh BPS 2. Penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi persiapan penyusunan publikasi pada tahun depan serta dapat melakukan identifikasi lebih dini terkait kendala yang kemungkinan dapat terjadi. 3. Melakukan penyusunan laporan kegiatan statistik harga sebagai bahan evaluasi dalam penyiapan bahan rilis data statistik Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. 4. Melakukan migrasi dan melengkapi data secara berkala pada website baru dengan data terbaru. Selain itu, akan dilakukan promosi website baru diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna data.
1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	1. Melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang lebih baik. 2. Pengawasan pada proses survei pada tahun berikutnya dengan lebih teliti sehingga diharapkan dapat menurunkan RSE.
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	
2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	1. Meningkatkan koordinasi dengan walidata untuk dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi pada website romantik terhadap kegiatan statistik sektoral yang diajukan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
	2. Melakukan internalisasi kepada OPD yang menjadi target pembinaan statistik sektoral agar memahami proses pengisian romantik.
2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	1. Meningkatkan koordinasi dengan walidata agar mengetahui OPD yang berkontribusi terhadap DDA melalui penerbitan surat pengantar dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang menyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh OPD sudah benar dan dapat disajikan kedalam DDA. 2. Meningkatkan koordinasi dengan walidata agar dapat menetapkan Standar Data Statistik untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Tanah Laut. 3. Bersama walidata menyusun jadwal rencana pengumpulan dan penyampaian metadata statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD.
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	
3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	1. Menugaskan kepada pegawai untuk mengikuti setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM terutama dalam pembinaan statistik sektoral. 2. Melakukan internalisasi kepada seluruh anggota tim Pembinaan Statistik Sektoral secara berkala. 3. Menyusun rencana pembinaan yang terstruktur dan terealisasi dengan penyusunan Lembar Kerja (LK) Pembinaan Statistik Sektoral. Diharapkan setiap proses pembinaan dapat dilakukan sesuai tahapan yang baik dan terdokumentasi dengan lengkap.
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	
SS4.1 SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
4.1.1 Hasil penilaian implementasi SAKIP	1. Melakukan pelaporan dokumen capaian kinerja hingga triwulan IV 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. 2. Melakukan monitoring evaluasi kinerja pegawai melalui SKP sebagai bahan dukung capaian kinerja organisasi. 3. Menyusun template analisis capaian kinerja setiap triwulan agar mendapatkan analisis capaian kinerja yang berkesinambungan.
4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	1. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana yang masih kurang untuk dilakukan persiapan pengadaan tahun anggaran selanjutnya. 2. Melakukan penataan pada Ruang PST dengan memenuhi standar minimal sarana. 3. Menetapkan tim pelayanan publik dan menerapkan jam pelayanan PST serta prosedur pelayanan kepada pengguna data.
PERJANJIAN KINERJA (PK) SUPLEMEN	
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
SS1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	
1.1.1 Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	1. Melakukan pembuatan laporan kegiatan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya jika menemui kendala yang sama. 2. Melakukan internalisasi SOP kegiatan kepada pegawai agar pelaksanaan monitoring dan pengawasan di setiap tahapan kegiatan di tahun mendatang sesuai SOP. 3. Melakukan reviu SOP secara berkala agar dapat menyesuaikan perubahan kondisi terbaru. 4. Melakukan evaluasi data yang dihasilkan pada periode survei sebelumnya agar data hasil pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat lebih berkualitas.
1.1.2 Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	1. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan catatan agar dapat meningkatkan nilai response rate pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
	2. Menjalin kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut agar dapat menjalin komunikasi kepada perusahaan yang menjadi sampel agar dapat memberikan jawaban dari survei yang dilakukan oleh BPS. 3. Menjalin komunikasi dan mengunjungi responden khususnya perusahaan agar dapat lebih terbuka dalam memberikan jawaban atas kegiatan survei yang dilakukan BPS.
1.1.3 Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota	Melakukan penyusunan laporan kegiatan statistik harga sebagai bahan evaluasi dalam penyiapan bahan rilis data statistik Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	
3.1.1 Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	1. Melakukan pencatatan hal-hal penting dan poin-poin evaluasi untuk kegiatan EPSS tahun selanjutnya, sehingga tidak menjadi kesalahan yang berulang. 2. Melakukan kerjasama dengan Tim Pembina Statistik Sektoral dalam membina lokus penilaian EPSS untuk mempersiapkan bukti dukung sejak awal, disesuaikan dengan bahan penilaian EPSS. 3. Melakukan pencatatan hal-hal penting dan poin-poin evaluasi untuk kegiatan EPSS tahun berjalan, sehingga tidak menjadi kesalahan yang berulang di EPSS tahun depan.
3.1.2 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah	Penyerahan hasil IPS 2024 kepada Pemda Tanah Laut sekaligus koordinasi terkait rencana pembangunan statistik sektoral tahun depan.
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	
SS4.1 SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	
4.1.1 Persentase Satker yang memperoleh predikat	Melakukan pengelolaan dokumen sumber yang lebih sistematis sehingga dapat lebih mudah dalam pengumpulan bukti dukung LKE ZI tahun depan.

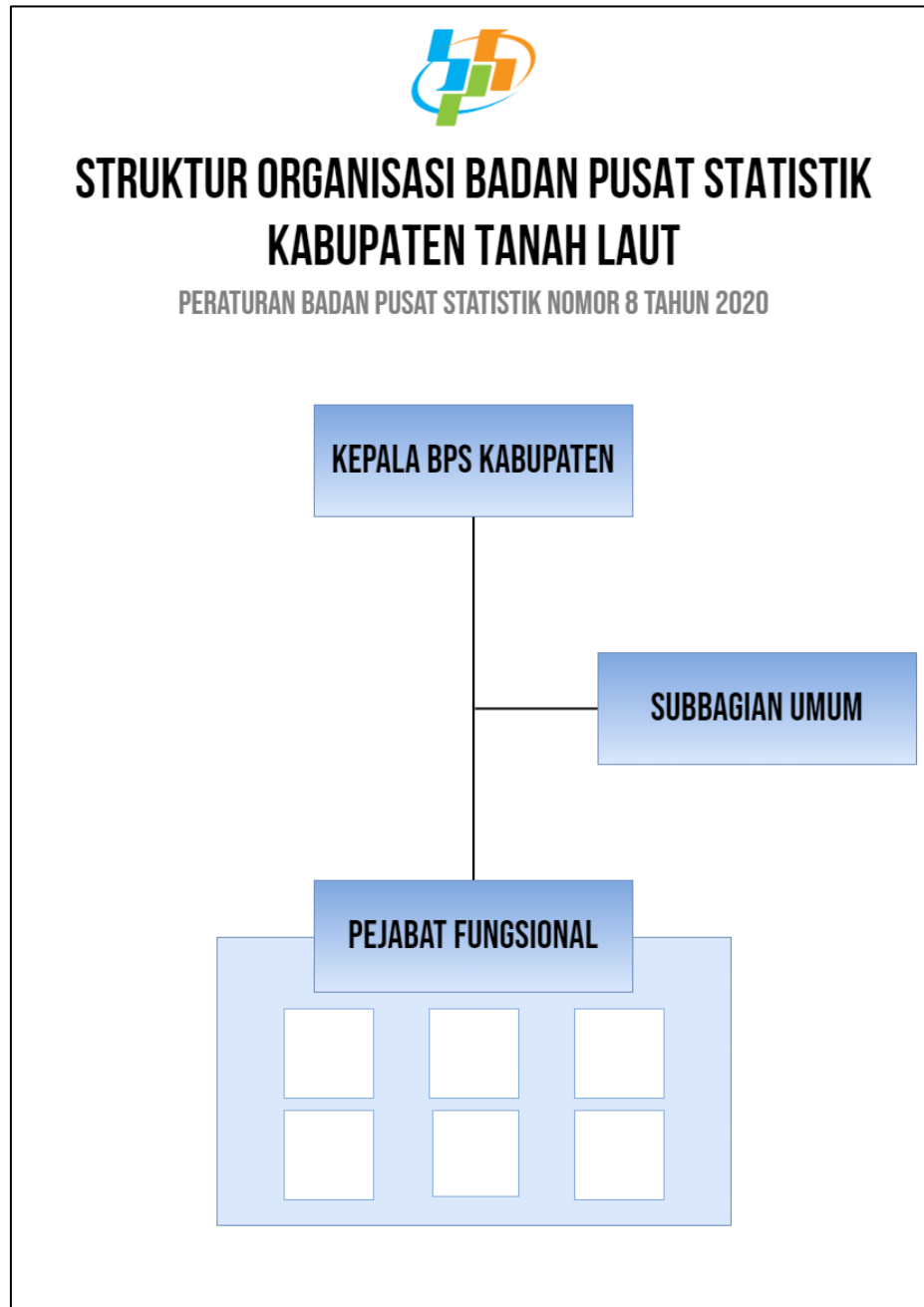
Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)	
4.1.2 Nilai Kinerja Anggaran minimal “Baik”	Menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai pertanggungjawaban penlaksanaa anggaran. Serta mempelajari LK Tahun 2024 sebagai bahan perbakan pada pelaksanaan tahun 2025.

The background features abstract geometric shapes in two shades of teal. A large, solid teal circle is positioned in the upper right quadrant. To its left, a smaller teal triangle points towards the center. In the lower half, two large, light teal triangles meet at a diagonal line, creating a sense of depth and movement. The overall composition is clean and modern.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota



Lampiran 2 Reviu Renstra Tahun 2020–2024 BPS Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan (%)	67*	70*	90	93	96	Kelompok Fungsional
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	-	-	100	100	100	Kelompok Fungsional
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	100	100	100	Kelompok Fungsional
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	-	-	60	65	70	Kelompok Fungsional
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	-	-	100	100	100	Kelompok Fungsional
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65	66	67	67,5	68	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	90	90	93	93	95	Subbagian Umum

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Tanah 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswo Widjanarko, MSE, M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Martin Wibisono, S.ST., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama

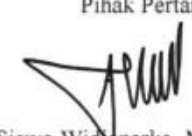
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Martin Wibisono, S.ST., M.Si
NIP. 19770218 199912 1 001

Banjarbaru, 29 Januari 2024
Pihak Pertama

Siswo Widjanarko, MSE, M.Sc.
NIP. 19730120 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	70
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	73,25
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

	Program		Anggaran
1.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	1.932.222.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp.	4.359.721.000
	Jumlah	Rp.	6.291.943.000

Banjarbaru, 29 Januari 2024

Pihak Kedua

Martin Wibisono, S.ST., M.Si.
NIP. 19770218 199912 1 001

Pihak Pertama

Siswo Widjanarko, MSE, M.Sc.
NIP. 19730120 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA SUPLEMEN TAHUN 2024
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	85
	Persentase rilis BRS yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota	Persen	100
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100
	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah	Poin	1,8
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)	Persen	100
	Nilai Kinerja Anggaran minimal "Baik".	Poin	81


 Pihak Kedua
Martin Wibisono, S.ST., M.Si.
 NIP. 19770218 199912 1 001

Banjarbaru, 29 Januari 2024
 Pihak Pertama

Siswo Widjanarko, MSE, M.Sc.
 NIP. 19730120 199412 1 001

Lampiran 4 Monitoring Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan													100
1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas													100
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	100
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	100
T2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN													99,29
2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN													99,29
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	75	100	100	100	75	100	100	125	100	100	100	120
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	0	0	0	70	0	10	10	55	0	14,29	14,29	78,57
T3 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN													120
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I													120
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	75	100	100	100	75	100	100	125	100	100	100	120
T4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi													96,52
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan													96,52
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	0	65,60	0,00	73,25	0	0	0	73,70	0	0	0	100,61
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	0	0,00	0,00	100	0	0	0	92,42	0	0	0	92,42
Nilai Capaian Kinerja													101,66

Lampiran 5 Analisis Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Tanah Laut 2024

Jabatan	Formasi (orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pejabat Struktural	2	1	4,35%
Fungsional Statistisi	27	18	78,26%
Statistis Ahli Madya	1	0	0,00%
Statistis Ahli Muda	6	2	8,70%
Statistis Ahli Pertama	13	9	39,13%
Statistis Penyelia	3	3	13,04%
Statistis Mahir	1	1	4,35%
Statistis Terampil	3	3	13,04%
Fungsional Pranata Komputer	9	2	8,70%
Pranata Komputer Ahli Madya	1	0	0,00%
Pranata Komputer Ahli Muda	2	1	4,35%
Pranata Komputer Ahli Pertama	3	1	4,35%
Pranata Komputer Penyelia	1	0	0,00%
Pranata Komputer Mahir	1	0	0,00%
Pranata Komputer Terampil	1	0	0,00%
Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	3	1	4,35%
Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0,00%
Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	4,35%
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	0,00%
Fungsional Penata Laksana Barang	2	0	0,00%
Penata Laksana Barang Terampil	2	0	0,00%
Fungsional Analis Anggaran	2	0	0,00%
Analis Anggaran Ahli Muda	1	0	0,00%
Analis Anggaran Ahli Pertama	1	0	0,00%
Fungsional Pustakawan	2	0	0,00%
Pustakawan Mahir	1	0	0,00%
Pustakawan Terampil	1	0	0,00%
Fungsional Kearsipan	1	0	0,00%
Pranata Kearsipan	1	0	0,00%
Pelaksana/Pengolah Data	5	1	4,35%
Jumlah	53	23	100,00%

Lampiran 6 Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut 2024

Bagikan



Nomor Katalog : 4701002.6301
Nomor Publikasi : 63010.24025
ISSN/ISBN : 2745-6229
Frekuensi Terbit : Tahunan
Tanggal Rilis : 13 Desember 2024
Bahasa : Indonesia
Ukuran File : 19.38 MB

Abstraksi

Data dan informasi diperlukan dalam rangka mendukung proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi hasil pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dirancang untuk menghasilkan data sosial ekonomi penduduk di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, kriminalitas, sosial budaya, dan persepsi masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangga. Pada tahun 2024, pengumpulan Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan hasil pengumpulan data melalui kuesioner KIR Susenas (VSEN22.K) dan kuesioner KP Susenas (VSEN22.KP) pada bulan Maret. Publikasi ini kemudian disajikan dalam bentuk angka persentase dari populasi di Kabupaten Tanah Laut. Sejumlah data dibedakan pula menurut jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan analisis kesetaraan gender. Selain itu, data juga dibedakan menurut kelompok pengeluaran untuk mengetahui kaitan variabel kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut 2024

Bagikan



Nomor Katalog : 4702004.6301
Nomor Publikasi : 63010.24023
ISSN/ISBN : 2745-6210
Frekuensi Terbit : Tahunan
Tanggal Rilis : 29 November 2024
Bahasa : Indonesia
Ukuran File : 71 MB

Abstraksi

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanah Laut antarwaktu dan perbandingannya antar karakteristik seperti jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan). Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut Agustus 2023

Bagikan



Nomor Katalog : 2303004.6301
Nomor Publikasi : 63010.24004
ISSN/ISBN : -
Frekuensi Terbit : Tahunan
Tanggal Rilis : 28 Juni 2024
Bahasa : Indonesia dan Inggris
Ukuran File : 2.61 MB

Abstraksi

Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut Agustus 2023 merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala setiap tahunnya. Publikasi ini memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut pada Agustus 2023. Data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada Agustus 2023 di Kabupaten Tanah Laut. Tabel yang ditampilkan mencakup penduduk berumur 15 tahun ke atas dan menurut jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran lebih detail tentang keadaan ketenagakerjaan sehingga lebih mampu menjadi alat analisis bagi para pengguna data. Publikasi ini juga menyajikan konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Sakernas.

Unduh Publikasi

Sumber: <https://tanahlautkab.bps.go.id/publication.html>

Lampiran 7 K/L/D/OPD yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2024

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Petahan 7014 Tel. (012) 2102 Fax. (012) 2123
Homepage: <http://tanahlautkab.bps.go.id> Email: bps631@bps.go.id

Petahan, 4 Maret 2024

Nomor : B-188/63010/OT.130/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala
Dinas Ketenahanan Pangan dan Perikanan
di:
Tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:
Judul : Perencanaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara : Dinas Ketenahanan Pangan dan Perikanan
dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:
Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas Rekomendasi : **V-24.6301.002**
Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Laut



Siswo Widjanarko, M.Sc., M.Si.
NIP. 19730120 199412 1 001

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Petahan 7014 Tel. (012) 2102 Fax. (012) 2123
Homepage: <http://tanahlautkab.bps.go.id> Email: bps631@bps.go.id

Lampiran Surat
Nomor : B-188/63010/OT.130/3/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik	
Judul	Perencanaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara	Dinas Ketenahanan Pangan dan Perikanan
Resume	https://monark.web.bps.go.id/hal/rekomendasi/V-24.6301.002
Rekomendasi	- Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Tanah Laut ini layak untuk diajukan sebagai kegiatan survei. - Penyenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Genre: Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional. - Penetapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka pengendalian kualitas pada setiap tahap kegiatan. - Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. - Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. - Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. - Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Petahan 7014 Tel. (012) 2102 Fax. (012) 2123
Homepage: <http://tanahlautkab.bps.go.id> Email: bps631@bps.go.id

Petahan, 26 Maret 2024

Nomor : B-233/63010/OT.130/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut
di:
Tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:
Judul : Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:
Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas Rekomendasi : **V-24.6301.003**
Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Laut



Siswo Widjanarko, M.Sc., M.Si.
NIP. 19730120 199412 1 001

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Petahan 7014 Tel. (012) 2102 Fax. (012) 2123
Homepage: <http://tanahlautkab.bps.go.id> Email: bps631@bps.go.id

Lampiran Surat
Nomor : B-233/63010/OT.130/3/2024
Tanggal : 26 Maret 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik	
Judul	Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
Resume	https://monark.web.bps.go.id/hal/rekomendasi/V-24.6301.003
Rekomendasi	- Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ini layak untuk diajukan sebagai kegiatan survei. - Penyenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Genre: Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional. - Penetapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka pengendalian kualitas pada setiap tahap kegiatan. - Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. - Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. - Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. - Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Pelehan 70114 Telp. (0512) 21002 Faks. (0512) 21213
Email: bps@bps.kab.go.id

Pelahan, 19 Februari 2024

Nomor : B-13463010/OT.130/02/2024

Sifat : biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala
Dinas Pengendalian Pertumbuhan, Kelangkaan Berencana,
Pembangunan Persewaan dan Perumahan Anak

di-
Tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (BISAP) bagi
Pentara Desa di Kabupaten Tanah Laut

Penyelenggara : Dinas Pengendalian Pertumbuhan, Kelangkaan Berencana, Pembangunan
Persewaan dan Perumahan Anak

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik berikut:

Identitas : **V-34.6301.001**

Rekomendasi : Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lampiran kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Laut



Siswanto Widiarjono, M.Sc., M.Sc.
NIP. 19730120 198412 1 001



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Pelehan 70114 Telp. (0512) 21002 Faks. (0512) 21213
Email: bps@bps.kab.go.id

Lampiran Surat

Nomor : B-13463010/OT.130/02/2024

Tanggal : 19 Februari 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (BISAP) bagi Pentara Desa di Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara	Dinas pengendalian pertumbuhan kelangkaan berencana persewaan perumahan dan perumahan anak
Resume	https://informatika.web.bps.go.id/induk-rekomendasi/V-34.6301.001
Rekomendasi	- Kegiatan Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (BISAP) bagi Pentara Desa di Kabupaten Tanah Laut ini layak untuk dijalankan, sebagai kegiatan survei. - Penyelenggaraan kegiatan statistik menurut pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) yang berlaku secara internasional. - Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. - Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. - Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. - Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. - Panduan penyusunan metadata statistik menurut pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Pelehan 70114 Telp. (0512) 21002 Faks. (0512) 21213
Email: bps@bps.kab.go.id

Pelahan, 2 April 2024

Nomor : B-250/63010/OT.130/04/2024

Sifat : biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

di-
Tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Kepuasan Masyarakat di BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Penyelenggara : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik berikut.

Identitas : **V-24.6301.004**

Rekomendasi : Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lampiran kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Laut



Siswanto Widiarjono, M.Sc., M.Sc.
NIP. 19730120 198412 1 001



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**
Jalan A. Syarif No. 9 Pelehan 70114 Telp. (0512) 21002 Faks. (0512) 21213
Email: bps@bps.kab.go.id

Lampiran Surat

Nomor : B-250/63010/OT.130/04/2024

Tanggal : 2 April 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Survei Kepuasan Masyarakat di BPKAD Kabupaten Tanah Laut
Penyelenggara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Resume	https://informatika.web.bps.go.id/induk-rekomendasi/V-24.6301.004
Rekomendasi	- Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini layak untuk dijalankan, sebagai kegiatan survei. - Penyelenggaraan kegiatan statistik menurut pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) yang berlaku secara internasional. - Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. - Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. - Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. - Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. - Panduan penyusunan metadata statistik menurut pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata.

Daftar Pelaporan Metadata Statistik									
Daftar semua pelaporan metadata statistik kabupaten yang telah diinput. Klik icon mata untuk melihat detail MD Kabupaten. MD Kabupaten dan MD Kecamatan									
No.	Nama Kegiatan	Tahun	Jenis Statistik	Produksi Data	Tanggal Diinputkan	Pelapor	Status	Aksi	
1.	Kompleks Data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut	2023	Statistik Sektoral	DAFTAR KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIP	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
2.	Kompleks Data KIR di Kabupaten Tanah Laut	2023	Statistik Sektoral	DAFTAR KETERANGAN HASIL PENGIRANGAN SUMBER SARA NABUNGAS	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
3.	Turunan-golongan Perekota di Kabupaten Tanah Laut	2023	Statistik Sektoral	DAFTAR KETERANGAN PANGKAS DAN PERKAWIN	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
4.	Pencatatan Lajuji Produktifitas Padi di Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekel Laut	DAFTAR TANAMAN PANGKAS HORTIKULTURA DAN PERKAWIN	25 November 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
5.	Pencatatan Data Terpadu Kependudukan Sosial (DPMS) Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sektoral	DAFTAR SIKSIS	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
6.	Survei Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sektoral	DAFTAR PERKAWIN LAMAS PERKAWIN SURGO DAN PERKAWIN	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
7.	Kompleks Data Kumpulan Wisata di Kabupaten Tanah Laut	2023	Statistik Sektoral	DAFTAR PERKAWIN	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
8.	Kompleks Data Berapung Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sektoral	DAFTAR KEMUKUNGAN DAN INFORMASI	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
9.	Kompleks Data Proti Kependudukan Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sektoral	DAFTAR KEMUKUNGAN	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		
10.	Kompleks Data Proti Pendidikan Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sektoral	DAFTAR PENDIDIKAN KEMUKUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT	28 Desember 2024	Belang Statistik dan Persendian Dokumen Kabi, Tanah Laut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Selesai		

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Jenis Statistik	Profilan Data	Tanggal Diunggah	Penyaji	Status	Aksi
01.	Kompleks Data untuk Penguji dan/atau Statistik Sekeloa Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekeloa	SDAS KOMPLEKS DAN INFORMATIKA	28 Oktober 2024	Bojeng Statistik dan Persamaan Diseminasi Kab. Tanah Laut Disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Selesai	Detail Download Share
02.	Survei Kepuasan Masyarakat Responden Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekeloa	SASDA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	28 Desember 2024	Bojeng Statistik dan Persamaan Diseminasi Kab. Tanah Laut Disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Selesai	Detail Download Share
03.	Survei Kepuasan Masyarakat di BPRD Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekeloa	SASDA PENGUJIAN KELOMPOK DAN ASSET DAERAH	30 Desember 2024	Bojeng Statistik dan Persamaan Diseminasi Kab. Tanah Laut Disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Selesai	Detail Download Share
04.	Pendataan Sumber Daya dan Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekeloa	SDAS KETEKNOLOGIAN DAN DATA PERUBAHAN	24 Oktober 2024	Bojeng Statistik dan Persamaan Diseminasi Kab. Tanah Laut Disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Selesai	Detail Download Share
05.	Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi Pemirsa Desa di Kabupaten Tanah Laut	2024	Statistik Sekeloa	SDAS PENGUJIAN KELOMPOK KELOMPOK BERKUALITAS PENDIDIKAN PENGUJIAN KELOMPOK BERKUALITAS PENDIDIKAN	24 Oktober 2024	Bojeng Statistik dan Persamaan Diseminasi Kab. Tanah Laut Disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Selesai	Detail Download Share

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jalan A. Syairani No. 9 Pelaihari Kab. Tanah Laut

Telepon : +62 512 21092, Fax : +62 512 21313

Email : bps6301@bps.go.id

Homepage : <https://tanahlautkab.bps.go.id/id>